

**PERBANDINGAN SEKURITISASI ISU PENGUNGSI
DI JERMAN DAN INGGRIS, 2015—2021**

(Skripsi)

Oleh

AYU PUSPITASARI

NPM 2216071157



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDARLAMPUNG

2026

ABSTRAK

**PERBANDINGAN SEKURITISASI PENGUNGSI
DI JERMAN DAN INGGRIS, 2015—2021**

Oleh

AYU PUSPITASARI

Jerman dan Inggris merupakan negara Uni Eropa, memiliki komitmen terhadap pengungsi secara regional dan internasional, menganut paham liberal, dan memiliki sejarah terhadap penerimaan pengungsi. Namun, arus pengungsi yang signifikan pada tahun 2015 menciptakan tekanan bagi Jerman dan Inggris, sehingga membentuk persepsi terhadap pengungsi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan persoalan pengungsi dan membandingkan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris tahun 2018—2021.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan *the Most Similar System Design* (MSSD) untuk menjelaskan persoalan pengungsi secara detail dan membandingkan dua negara. Fokus penelitian ini ialah perbandingan sekuritisasi isu pengungsi khususnya di Jerman dan Inggris yang dianalisis dengan menggunakan teori sekuritisasi milik Buzan, Ole, dan Wilde. Data dihimpun menggunakan teknik studi pustaka. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari pelbagai sumber tertulis, meliputi buku, jurnal artikel, publikasi media, dan dataset internasional. Data yang telah terhimpun kemudian dianalisis menggunakan teknik kondensasi dan triangulasi data.

Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa persoalan pengungsi di Jerman dan Inggris menjadi persoalan penting sejak Krisis Pengungsi tahun 2015. Jaringan migran, ekonomi, geografi, dan budaya menjadi faktor determinan pengungsi memilih Jerman dan Inggris sebagai negara tujuan. Hasil kajian ini juga menegaskan bahwa proses sekuritisasi pengungsi di Inggris lebih awal dibandingkan dengan Jerman. Dampak dari proses sekuritisasi ini menyebabkan Inggris melakukan referendum Brexit tahun 2016 dan Jerman lebih memperketat kebijakan terhadap penerimaan pengungsi.

Kata kunci: Jerman, Inggris, pengungsi, sekuritisasi, studi komparasi

ABSTRACT

A COMPARATIVE STUDY OF REFUGEE SECURITIZATION IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, 2015—2021

Oleh

AYU PUSPITASARI

Germany and the United Kingdom are European countries with regional and international commitments to refugees, liberal ideologies, and long histories of refugee reception. However, the significant influx of refugees in 2015 created pressure for both nations, shaping their perceptions of displaced populations. Therefore, this study aims to explain the refugee issue and compare the securitization of refugees in Germany and the UK from 2018–2021. This research utilizes a descriptive qualitative method with a case study approach and Most Similar System Design (MSSD) to explain the refugee problem in detail while comparing the two countries. The focus of this study is the comparative securitization of the refugee issue, analyzed using the securitization theory developed by Buzan, Wæver, and de Wilde. Data were gathered through literature review techniques, involving the collection and analysis of various written sources including books, journal articles, media publications, and international datasets. The collected data were then analyzed using data condensation and triangulation techniques. The results of this study indicate that the refugee issue has become a critical concern in Germany and the UK since the 2015 Refugee Crisis. Migrant networks, economic factors, geography, and culture are the determinant factors for refugees choosing Germany and the UK as destination countries. Furthermore, this study confirms that the process of refugee securitization occurred earlier in the UK than in Germany. The impact of this securitization process led the UK to hold the Brexit referendum in 2016, while Germany responded by significantly tightening its refugee reception policies.

Keywords: *comparative study, Germany, refugee, securitization, UK*

**PERBANDINGAN SEKURITISASI ISU PENGUNGSI
DI JERMAN DAN INGGRIS, 2015—2021**

Oleh

Ayu Puspitasari

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **Perbandingan Sekuritisasi Pengungsi di Jerman dan Inggris, 2015—2021**

Nama Mahasiswa : **Ayu Puspitasari**

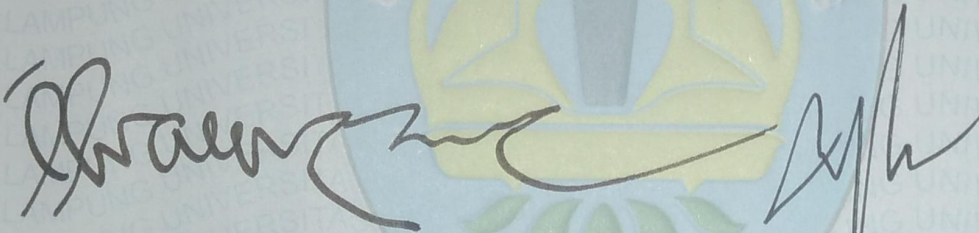
Nomor Pokok Mahasiswa : **2216071157**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



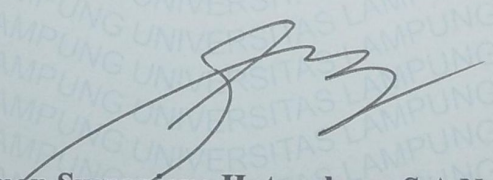
Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.

Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.

NIP. 198604282015041004

NIP. 199209262024092001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional



Dr. Simon Sumanjaya Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.

Sekretaris : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.

Penguji Utama: Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Februari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung Maupin di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 28 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Ayu Puspitasari
NPM. 2216071157

RIWAYAT HIDUP



Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara yang dilahirkan di Kota Gajah pada 05 Desember 2003 dari pasangan Bapak Wawan dan Ibu Betty.

Penulis memulai perjalanan hidupnya dari pendidikan formal di TK Aisyah, Kota Gajah. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan formalnya ke SD Negeri 3 Kota Gajah, SMP Negeri 2 Kota Gajah, dan SMA Negeri 1 Kota Gajah.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa program studi S-1 di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur tes SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan akademik, seperti menulis jurnal dan artikel, serta berhasil mendapatkan nominasi *Best Paper Awardee* dalam kegiatan *Indonesian Internasional Conference on Cultural Diplomacy (IICCD) 2025* yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Penulis juga telah mempublikasi jurnal terakreditasi SINTA 4 yang berjudul “*Indonesia’s Cultural Diplomacy in Introducing Subak and Spice Routes at World Water Forum 2024*”. Selain itu, penulis aktif menjadi bagian *research and development* di *Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Chapter* Universitas Lampung. Di tahun 2024, penulis mendapatkan kesempatan menjadi *awardee* Dewan Perwakilan Remaja (DPRemaja 3.0), mengunjungi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penulis juga telah menjalankan lebih dari 10+ proyek sosial yang memiliki dampak kepada lebih dari 1.245+ pemuda Indonesia.

Motto

“Allah akan memberi pada waktunya, saat kita sudah benar-benar layak mendapatkannya, semua hanya perihal waktu”

-Q.S. Fatir: 13

*If you have a dreams,
Its means you are young forever*

-SUHO, EXO

*Saida de'it mak ó tau ó nia enerjia ba, sei buras no mai fila fali mai ó!
(Whatever you put energy into, it will grow and come to you!)*

-Timor-Leste

PERSEMBAHAN

Untuk Diri Sendiri, Bapak, Mamah,
dan *Aa* (kakak) tercinta Serta Seluruh Pembaca

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucap atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul *Perbandingan Sekuritisasi Pengungsi di Jerman dan Inggris, 2015—2021* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku ketua jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mas Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa sabar dalam membimbing dan memberikan masukan baik intelektual maupun praktikal kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi. Terima kasih juga atas dedikasi Mas Tyo sebagai pendidik. Ketulusan beliau dalam mengajar telah menumbuhkan rasa hormat penulis terhadap setiap ilmu pengetahuan yang dipelajari;
4. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi sekaligus dosen yang selalu mendukung penulis untuk eksplorasi pengalaman baru di luar kampus. Terima kasih atas setiap arahan dan ketulusan yang menjadi fondasi bagi kepercayaan diri penulis hingga mampu sampai pada titik ini.
5. Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan perspektif baru, saran, dan motivasi agar skripsi penulis layak dan bermanfaat bagi pembaca, serta dapat berkontribusi terhadap referensi akademik jurusan Hubungan Internasional.

6. Tety Rachmawati, S.IP., M.A. selaku dosen yang telah berjasa dalam proses belajar penulis untuk mengasah ketajaman analisis dan kemampuan menulis ilmiah. Kepercayaan, kesabaran, dan ketulusan yang diberikan Mba Tety membuat penulis percaya dan menghargai setiap proses yang ada.
7. Dosen-dosen yang membantu penulis dalam proses belajar dan selalu mendukung penulis dalam kegiatan di luar kampus, utamanya Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si., Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A., Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A., Yunda Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A., Dr. Arie Fitria, S.IP., MT, DEA., Mr. Luerdi, S.IP., M.Si., dan Mba Nibras Fadhlillah, S.IP.M.Si.
8. Seluruh dosen dan staf jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, tenaga, dan bantuan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
9. Keluarga penulis, Bapak, Mamah, *Aa* Dedek, *Aa* Kiki, Mba Ipar Nita, yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril serta materil selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studinya;
10. Keluarga Amoy; Rere, Manda, Syaikha, Aji, dan Mulkan, yang menjadi ruang untuk menumpahkan segala keluh kesah. Terima kasih telah menjadi saksi tumbuh kembang penulis dan memastikan bahwa masa perkulihan tidak sekedar lewat, namun menetap di memori yang paling panjang.
11. Nadya Adelia, sahabat diskusi yang senantiasa mendukung dan memberikan afirmasi positif di setiap langkah penulis. Terima kasih telah hadir dan memberikan warna pada hari-hari penulis, menjadikan perjalanan yang panjang terasa lebih '*ramai*' dan bermakna untuk dikenang.
12. Mayza Valancia, teman seperjuangan dalam meraih mimpi di kancah global. Terima kasih telah selalu berjuang, berjalan beriringan, dan saling menguatkan sampai titik ini.
13. Kak Anin, yang senantiasa meluangkan waktu untuk menjawab berbagai pertanyaan serta memberikan dukungan penuh dalam persiapan seminar penulis.

14. Anisa Shafira, terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Kehadiran Saca sangat berarti dalam proses berkembang dan proses kelancaran penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman seperjuangan penulis, Afiyah, Fathia, Astrit, Assabilla, Afni, Ayu Nadya, Aulia (Aul), dan Atika yang membuat penulis semangat serta bersungguh-sungguh menyelesaikan studi sarjana.
16. Sahabat penulis; Nuyuy dan Tria yang senantiasa memberikan dukungan terhadap penulis sejak di bangku SMA. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang penulis dan menjadi bukti nyata bahwa kesetiaan dalam pertemanan itu benar adanya.
17. Alfina, terima kasih telah merayakan setiap pencapaian kecil penulis dengan tulus. Terima kasih telah hadir dalam perjalanan penulis sehingga menjadikan *chapter* hidup penulis menjadi lebih terisi.
18. Kucing penulis; Ciko, Ciki, Coco, Pipin, Pipi, dan Muza, yang menjadi saksi bisu dalam perjuangan penulis mendapatkan kampus impian sampai di titik ini mendapatkan gelar sarjana.
19. Grup K-Pop EXO, Kim Minseok, Kim Junmyon, Zhang Yixing, Byun Baekhyune, Kim Jongdae, Park Chanyeol, Doh Kyungsoo, Kim Jongin, dan Oh Sehun yang senantiasa mengisi hari-hari penulis dengan kebahagiaan melalui karya-nya.
20. Karya musik Taylor Swift, Lany, serta alunan *relaxing music* yang senantiasa menemani malam-malam sunyi penulis dalam merangkai setiap kata dalam skripsi ini.
21. Terakhir, kepada *aksa* yang seringkali terabaikan namun paling tangguh berjuang: Ayu Puspitasari. Terima kasih telah bertahan hingga di titik ini, meskipun badai di tahun 2023 sempat memaksa untuk berhenti bermimpi. Terima kasih telah tumbuh menjadi perempuan yang berani merawat mimpi dan berdiri tegak dengan percaya diri. Berbahagialah dengan caramu sendiri; biarkan ekspektasi dunia luruh, dan biarkan langkahmu menari bebas di atas kanvas kehidupan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Konseptual.....	18
2.2.1 Teori Sekuritisasi.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran	24
III. METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Sumber Data.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	31

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran umum pengungsi di Eropa	31
4.1.1 Gambaran umum pengungsi di Jerman	35
4.1.2 Gambaran umum pengungsi di Inggris	40
4.2 Gambaran umum proses sekuritisasi	46
4.2.1 Proses sekuritisasi pengungsi di Jerman	47
4.2.2 Proses sekuritisasi pengungsi di Inggris	58
4.3 Analisis perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris	67
V. SIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Kerangka Analisis menggunakan Teori Sekuritisasi Buzan, Ole, dan Wilde	20
Tabel 1. 2 Tiga tingkatan dalam spektrum sekuritisasi Barry Buzan.....	22
Tabel 4. 1 Jenis akomodasi yang diberikan oleh Pemerintah Inggris kepada pencari suaka	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1. Data negara tujuan utama pencari suaka, 2008—2019	3	
2. Data imigran di lima negara Uni Eropa tahun 2014.....	4	
3. Visualisasi kepadatan istilah berdasarkan analisis data bibliometrik menggunakan VOSviewer	11	
4. Hasil analisis jaringan bibliometrik berdasarkan data yang diolah melalui VOSviewer.....	12	
5. Perluasan kajian keamanan dalam Hubungan Internasional	19	
6. Kerangka pemikiran penelitian	24	
7. Jumlah pendaftar pencari suaka ke negara-negara Eropa, 2015—2021.....	32	
8. Rute Mediterania Tengah.....	33	
9. Rute mediterania timur dan Balkan Barat	34	
10. Rute Mediterania Barat.....	34	
11. Jumlah pengungsi yang mendapatkan status resmi.....	37	
12. Jumlah pengungsi di Inggris yang diakui secara resmi, 2015—2021	43	
13. Poster kampanye AfD tahun 2018.....	53	
14. Poster kampanye AfD yang menggunakan narasi anti-Islam	53	
15. Pendapat publik terkait pengurangan jumlah pengungsi tahun 2015—2021 .	65	
16. Fluktuasi kekhawatiran publik Inggris terhadap Isu Imigrasi, 1990—2025 ..	66	

DAFTAR SINGKATAN

AfD	: <i>The Alternative for Germany</i>
ASAP	: <i>Afghan Relocations and Assistance Policy</i>
AWO	: <i>Arbeiterwohlfahrt</i>
BMI	: <i>Bundesministerium des Innern</i>
Brexit	: <i>British exit</i>
CDU	: <i>Christlich Demokratische Union</i>
CEAS	: <i>Common European Asylum System</i>
CSU	: <i>Christian Social Union</i>
ECHR	: <i>European Convention on Human Rights</i>
ECRE	: <i>European Council on Refugees and Exiles</i>
ECtHR	: <i>European Court of Human Rights (ECtHR)</i>
EU	: <i>European Union</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
INGO	: <i>International Non-Governmental Organization</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MSSD	: <i>Most Similar System Design</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
PEGIDA	: <i>Patriotic Europeans against the Islamisation of the Occident</i>
Pemilu	: Pemilihan Umum
PoP	: <i>Publish or Perish</i>
RAS	: <i>Refugees and Asylum Seekers</i>
RASUs	: <i>Refugees, Asylum Seekers, and Undocumented Migrants</i>

RISE	: <i>The Refugees Ideas & Solutions for Europe</i>
SPD	: <i>Sozialdemokratische Partei Deutschlands</i>
UK	: <i>United Kingdom</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
USA	: <i>United States of America</i>
UU	: <i>Undang-Undang</i>

I. PENDAHULUAN

Skripsi ini mengkaji perbandingan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris dengan menggunakan alat potret teori sekuritisasi milik Buzan, Ole, dan Wilde. Kajian ini penting dan layak untuk dikaji lantaran sejak Krisis Pengungsi tahun 2015, isu migrasi¹ terus menjadi perdebatan utama di Eropa. Jerman dan Inggris adalah dua negara yang memiliki karakteristik serupa terkait persoalan pengungsi; meskipun demikian, terdapat perbedaan respons. Perbedaan tajam dalam merespons isu yang sama menunjukkan adanya *gap* empiris yang penting untuk dikaji melalui perspektif sekuritisasi. Selain itu, melalui VOSviewer, peneliti melihat masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji isu pengungsi, khususnya berkaitan dengan studi perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris. Oleh karena itu, bab ini menyajikan secara jelas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu pengungsi menjadi persoalan penting yang diperdebatkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa sejak Krisis Pengungsi tahun 2015 (Kok, 2021). Saat itu, pengungsi datang dalam jumlah yang besar dari Suriah akibat konflik dalam negeri. Pengungsi dari Afganistan, Irak, Pakistan, Nigeria, dan Afrika Selatan turut

¹ Migrasi merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang ke luar yuridiksinya baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk imigran dan pengungsi (Joppke, 1999; Zolberg, 1999).

menyebabkan eskalasi jumlah pengungsi di Eropa (Di Lasio & Wahba, 2023; UNHCR/IOM, 2015). Negara-negara Uni Eropa dipilih sebagai tujuan pengungsi lantaran secara geografis sangat strategis dan mudah di akses melalui laut Mediterania, Turki, dan Yunani. Para pengungsi mencari perlindungan ke Eropa Barat karena dianggap mampu menjamin kehidupan yang lebih baik (ABCNews, 2025)². Hal ini juga dikarenakan negara anggota Uni Eropa telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang menunjukkan komitmen terhadap perlindungan pengungsi. Kedua hukum internasional ini menyajikan aturan komprehensif mengenai hak-hak pengungsi di tingkat internasional (Weis, 1999).

Berdasarkan hukum internasional tersebut, perlindungan pengungsi harus sesuai dengan tiga prinsip utama, yaitu *non-discrimination*, *non-penalization*, dan *non-refoulement* (UNHCR, 1951). Negara yang telah meratifikasi kedua konvensi tersebut harus berlaku adil dalam menjamin hak dan perlindungan pengungsi. Negara tidak boleh membeda-bedakan pengungsi atas dasar ras, agama, atau negara asal. Hal tersebut sesuai dengan pasal 3 Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (*non-discrimination*). Prinsip kedua menyoroti bahwa negara tidak diperbolehkan memberikan hukuman pidana pada pengungsi karena memasuki wilayah—negara tujuan—secara ilegal (*non-penalization*). Terlebih, masuknya pengungsi ke wilayah tersebut didorong oleh adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup pengungsi. Ketiga, negara tujuan dilarang melakukan pemulangan atau pemindahan secara paksa terhadap pengungsi, sesuai dengan prinsip *non-refoulement*³.

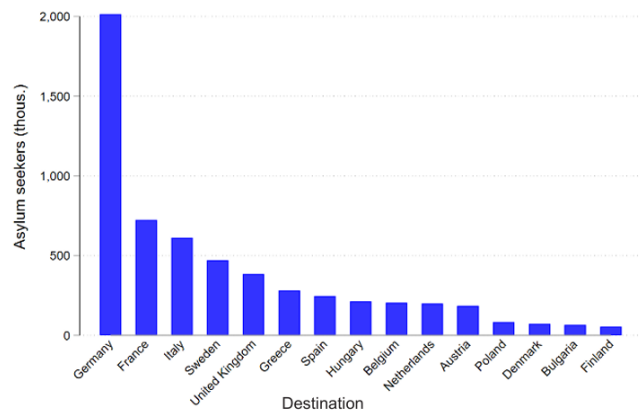
Di tingkat regional, terdapat *Comon European Asylum System* (CEAS) sebagai standar sistem bagi negara anggota Uni Eropa untuk menghadapi permasalahan pengungsi. Sistem ini mencakup sistem prosedur dan penerimaan pengungsi yang tidak ada dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (Chrisella, 2022).

² Pada menit ke 6.31/6.47 dalam YouTube channel ABC News, link: <https://youtu.be/eXYeDD5dUQQ?si=AcOY4E9AssukcwCn> salah satu pengungsi yang menyebrang melewati laut Mediterania berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik di UK (ABCNews, 2025).

³ Termaktub dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (UNHCR, 1951; Weis, 1999).

Perjanjian regional ini wajib diimplementasikan oleh seluruh negara anggota Uni Eropa dibawah naungan *European Court of Human Rights* (ECtHR). Adapun tiga hak fundamental yang dijamin dalam konvensi ini, diantaranya hak dasar manusia untuk hidup (*right to life; article 2*), hak atas kebebasan dan keamanan (*right to liberty and security; article 5*), dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil (*right to a fair trial; article 6*) (Council of Europe, 1950).

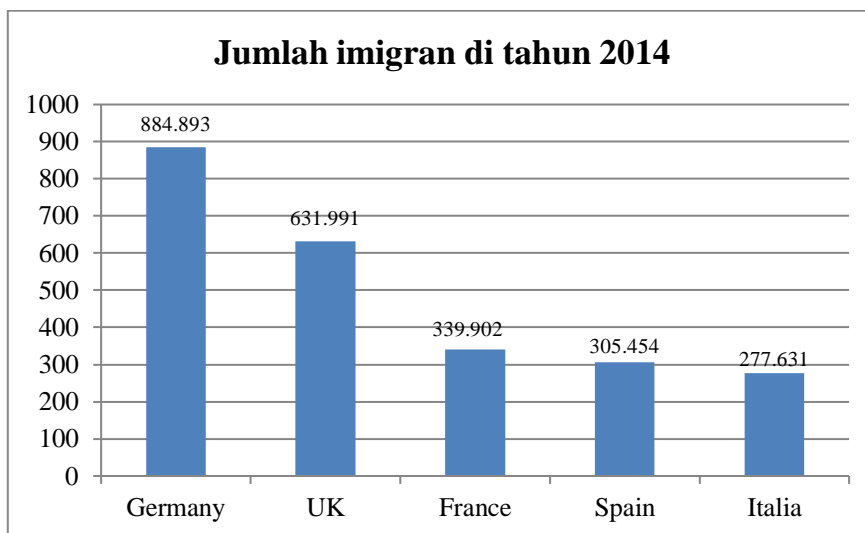
Adanya kewajiban hukum dan moral untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi menjadi alasan para pengungsi tahun 2015 memilih Eropa sebagai tempat untuk mencari keamanan. Jerman dan Inggris menjadi dua negara tujuan utama para pengungsi untuk mencari perlindungan dari bahaya yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Jerman dan Inggris dipilih sebagai negara tujuan utama pengungsi didasari atas faktor sejarah, jaringan sosial, dan kebijakan perlindungan pengungsi secara internasional dan regional (Di Lasio & Wahba, 2023; Middleton, 2005; Siddiqui, 2024). Ketiga faktor ini penting sebagai pertimbangan pengungsi untuk melanjutkan kehidupan yang lebih layak. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa selama 12 tahun berturut-turut, Jerman menjadi negara tujuan utama para pencari suaka untuk mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi.



Gambar 1.1 Data negara tujuan utama pencari suaka, 2008—2019

Sumber: (Di Lasio & Wahba, 2023)

Sejarah imigran yang sudah terbentuk sejak tahun 1980-an bagi Jerman dan Inggris dapat berdampak pada jaringan sosial yang terbentuk di masing-masing negara. Jaringan sosial ini terus berkembang dengan adanya kebijakan imigrasi terbuka (*open door immigration policy*) yang diberlakukan oleh Uni Eropa sejak tahun 1973. Kebijakan ini menyebabkan migran dari negara anggota dan non anggota Uni Eropa berdatangan. Data pada gambar 1.2 merepresentasikan bahwa Jerman dan Inggris adalah dua negara yang paling banyak dipilih sebagai negara tujuan oleh para imigran.



Gambar 1.2 Data imigran di lima negara Uni Eropa tahun 2014⁴

Sumber: diolah oleh peneliti dari (Boswell, 2016) menggunakan excel

Gelombang pengungsi kemudian mencuat pada tahun 2015 yang menyebabkan Krisis Pengungsi. Jerman dan Inggris tidak luput dari dampak gelombang manusia tersebut. Sebagai negara yang memiliki paham liberal, Jerman dan Inggris menghadapi tekanan internasional, Hak Asasi Manusia (HAM), dan

⁴ Data imigran ditampilkan untuk membantu peneliti dan pembaca memahami mengapa Jerman dan Inggris menjadi negara tujuan utama pengungsi. Imigran yang sudah lebih dahulu bermigrasi ke Jerman dan Inggris akan membantu pengungsi/pencari suaka mendapatkan informasi dan dukungan (Boswell, 2016).

norma internasional terhadap perlindungan pengungsi sehingga memunculkan dilema atas kendali terhadap pengungsi (Gibney & Hansen, 2003; Joppke, 1999). Fenomena ini menimbulkan perdebatan ketika jumlah pengungsi terus bertambah, tetapi penanganan dan kapasitas negara terbatas. Penerimaan pengungsi tanpa adanya proses integrasi juga akan berdampak pada stabilitas keamanan di suatu negara.

Arus pengungsi yang bebas dan cepat menciptakan tantangan tersendiri bagi Jerman dan Inggris. Meskipun kedua negara ini memiliki karakteristik yang serupa sebagai negara anggota Uni Eropa, komitmen internasional, negara tujuan utama, negara liberal, dan memiliki sejarah penerimaan pengungsi, tidak serta-merta menyeragamkan respons rasional terhadap kehadiran pengungsi. Inggris cenderung menarasikan pengungsi sebagai isu keamanan dibandingkan dengan Jerman yang lebih terbuka. Hal ini dikarenakan Inggris mengalami kesulitan dalam mengendalikan laju pengungsi.

Pengungsi yang tidak terintegrasi menciptakan tantangan bagi Inggris dalam hal lapangan pekerjaan—persaingan kompetitif dengan penduduk asli; kriminalitas; dan peningkatan anggaran layanan publik. Menurut *The Sun Freedom of Information*, telah terjadi peningkatan kriminalitas di Inggris sepanjang periode 2015—2016. Sebanyak 900 pengungsi melakukan tindakan kriminalitas berupa pencabulan, pembunuhan, dan kekerasan terhadap anak di bawah umur (M. Hamilton, 2016; Putra et al., 2016). Selain itu, peningkatan pengungsi yang tidak dibarengi dengan kontrol dan penyediaan tempat tinggal yang layak dapat menciptakan lingkungan kumuh, kotor, dan sumber kriminalitas. Di sisi lain, anggaran biaya untuk penyediaan layanan publik juga akan meningkat. Permasalahan yang dihadapi oleh Inggris memunculkan narasi bahwa pengungsi adalah ancaman eksistensial.

Berbeda dengan Inggris, Jerman menjadi negara yang paling banyak menerima pengungsi. Kanselir Jerman Angela Merkel menerapkan kebijakan *open door policy* sebagai basis penerimaan pengungsi baik dari Suriah, Afganistan, Irak, Pakistan, maupun negara anggota Uni Eropa lainnya. Diperkirakan sebanyak 800.000 pengungsi yang telah diterima oleh Jerman pada periode Krisis Pengungsi tahun 2015

(Setiabudi, 2021). Jumlah ini terus bertambah mencapai 1,7 juta pengungsi di tahun 2017 (Mustaq et al., 2021; Trines, 2019). Dukungan penerimaan pengungsi di Jerman direpresentasikan dalam pidato Kanselir Jerman Merkel. Merkel (2015) mengatakan bahwa Jerman adalah negara yang besar dan negara yang kuat sehingga mampu menangani krisis pengungsi. Pemerintah Jerman tidak memandang pengungsi sebagai krisis melainkan sebagai tragedi yang menciptakan korban—berupa pengungsi (Lindvall, 2016) sehingga perlu pertolongan.

“Germany is a strong country, and since we have so done much, the aim has to be that we can do this. We can do it, although there are obstacles in the way, it must be worked out and the government will do everything in its power to (...) accomplish that” (Merkel, 2015).

Bagi Jerman, pengungsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses integrasi ke pasar tenaga kerja dan pendidikan. Produk Domestik Bruto (PDB) Jerman terprediksi meningkat hingga 95 miliar euro atau setara dengan Rp1,76 kuadriliun pada tahun 2016—2020 (Hentze & Kolev, 2016). Kebijakan ini juga memberikan harapan kepada pengungsi yang mencari perlindungan di samping banyak negara anggota Uni Eropa lainnya yang menolak. Sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951, Jerman tidak memaksa para pengungsi kembali ke negara asalnya, melainkan jika ada pengungsi yang ingin kembali secara sukarela dipersilahkan (Mustaq et al., 2021). Berbeda dengan Inggris yang sengaja menciptakan lingkungan tidak ramah pengungsi dengan tujuan agar para pengungsi pergi secara sukarela (*hostile environment*) (Perez, 2023).

Pembingkaiian persoalan pengungsi yang dilakukan oleh Jerman dan Inggris didasarkan atas keputusan rasional melihat dinamika pengungsi yang terjadi. Gelombang pengungsi akibat *open door immigration policy* mendorong Inggris mengambil keputusan referendum Brexit tahun 2016. Mayoritas masyarakat setuju untuk keluar dari Uni Eropa. Di tahun 2016—2019 Inggris melakukan negosiasi dengan Uni Eropa dan resmi Brexit tahun 2021. Keputusan ini menjadikan Inggris independen dalam mengatur dan membuat kebijakan terkait pengungsi. Sebaliknya,

Jerman mengambil tindakan dengan menerima pengungsi dalam jumlah besar sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jerman justru menganggap kelompok nasionalisme dan *xenophobia* terhadap pengungsi adalah ancaman eksistensial karena dapat mengancam kerja sama Jerman dengan Uni Eropa (Lindvall, 2016).

Kajian mengenai sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris menjadi penting dan layak mengingat masih terbatasnya penelitian yang secara khusus membahas dinamika sekuritisasi di negara anggota dan non-anggota Uni Eropa. Persoalan pengungsi juga menimbulkan pro dan kontra dari negara anggota Uni Eropa dan Inggris. Jerman, contohnya, yang melihat pengungsi sebagai peluang untuk memperkuat sektor tenaga kerja; dan Inggris yang melihat pengungsi sebagai ancaman bagi masyarakat asli dan kedaulatan negara. Respons kedua negara ini cukup unik mengingat keduanya memiliki karakteristik serupa terkait persoalan pengungsi. Namun, memiliki perbedaan yang jelas dalam merespons persoalan tersebut. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan dan membandingkan persoalan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris tahun 2015—2021.

1.2 Rumusan Masalah

Jerman dan Inggris merupakan dua negara yang memiliki karakteristik serupa terkait persoalan pengungsi. Kedua negara menyatakan komitmennya melalui hukum regional dan internasional sehingga secara hukum dan moral memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi yang datang. Jerman dan Inggris juga merupakan negara anggota Uni Eropa, negara liberal, menjadi tujuan utama pengungsi, dan memiliki sejarah terhadap penerimaan pengungsi. Namun, arus pengungsi besar di tahun 2015 menciptakan tekanan bagi Jerman dan Inggris. Karakteristik serupa tersebut tidak serta-merta menyeragamkan respons dan tindakan

Jerman dan Inggris terhadap pengungsi. Jerman menerima pengungsi dengan jumlah besar di samping penolakan dari negara anggota Uni Eropa lainnya. Sedangkan, Inggris membingkai pengungsi sebagai ancaman eksistensial yang mendorong terjadinya Brexit. Dari perbedaan respons Jerman dan Inggris terhadap pengungsi tersebut, memunculkan pertanyaan penelitian “Bagaimana perbandingan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris tahun 2015—2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian perbandingan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Menjelaskan persoalan pengungsi di Jerman dan Inggris; dan
2. Membandingkan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi perbandingan ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademis dan praktis, antara lain:

- a. Manfaat Akademis

Peneliti berharap kajian ini dapat memperkaya referensi akademik dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya pada kajian keamanan non-tradisional, pengungsi, dan Uni Eropa. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dan mengembangkan penelitian dengan topik serupa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi media pembelajaran dan sumber ilmu bagi pelajar dan pengajar di rumpun studi Hubungan Internasional maupun studi lainya yang relevan. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat luas yang membaca hasil penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua, peneliti menyajikan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, landasan konseptual, dan kerangka berpikir. Bagian pertama terdiri dari ulasan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan celah (*gap*) dan kebaruan dari kajian sebelumnya. Bagian kedua, peneliti menguraikan teori sekuritisasi dari mazhab *Copenhagen School of Security Studies* milik Barry Buzan. Teori ini digunakan sebagai kerangka untuk menyederhanakan pandangan terhadap suatu isu yang rumit dan menyelaraskan pemahaman antara peneliti dan pembaca. Kemudian, pada bagian ketiga, peneliti menyajikan kerangka berpikir agar penelitian ini memiliki fokus kajian yang jelas dan terstruktur.

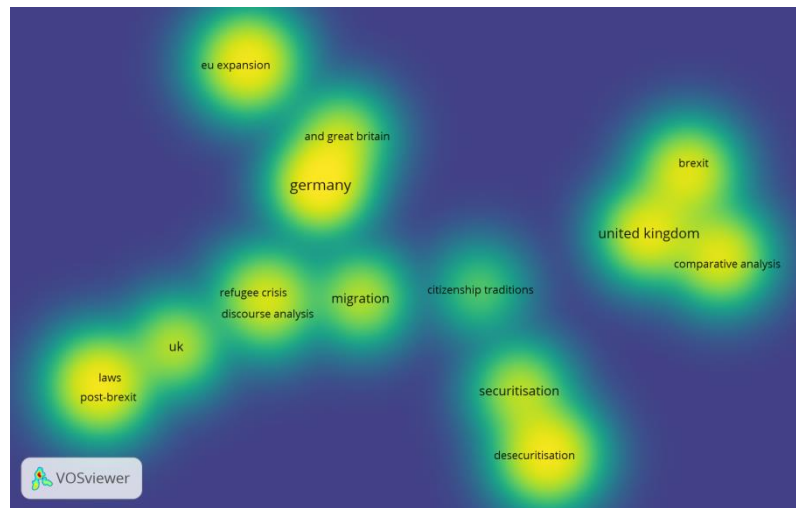
2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada kajian-kajian sebelumnya yang pernah diteliti oleh akademisi maupun peneliti lain mengenai topik yang serupa—dalam hal ini isu pengungsi. Secara spesifik, perbandingan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris menggunakan alat potret teori sekuritisasi Buzan, Ole, dan Wilde belum banyak dikaji oleh peneliti lainnya. Hal ini dibuktikan dengan analisis bibliometrik untuk mencari kebaruan (*novelty*) melalui keterhubungan kata kunci pada penelitian sebelumnya. Alat bantu yang digunakan dalam melakukan analisis bibliometrik, yaitu Publish or Perish (PoP), Mendeley, dan VOSviewer. Peneliti menggunakan kata kunci “*securitization*”, “*refugee*”, “*United Kingdom*”, “*Germany*”, dan “*Brexit*”. Kata kunci ini digunakan untuk menemukan sumber bacaan yang sesuai dengan topik

penelitian, termasuk sumber-sumber di tahun 1990-an dan 2000-an. Setelah itu, peneliti memasukan data kata kunci tersebut ke PoP untuk menghimpun 200 literatur dari pelbagai sumber jurnal dan buku.

Peneliti menemukan sepuluh literatur yang bersinggungan dengan topik penelitian dalam kajian ini. Sepuluh literatur tersebut diantaranya membahas migrasi transnasional sebagai isu keamanan di Jerman dan Inggris selama Krisis Pengungsi tahun 2015 (Lindvall, 2016); perbandingan kebijakan imigrasi di tiga negara liberal, Amerika Serikat, Britania Raya, dan Jerman (Joppke, 1999); perkembangan tata kelola migran dan pencari suaka sebagai krisis (Sahin-Mencutek et al., 2022); kebijakan imigrasi sebagai bagian dari sejarah sistem hukum, tujuan kebijakan, dan persepsi masyarakat di Kanada, Jerman, AS, dan Britania Raya yang memiliki tantangan imigrasi yang sama (Siddiqui, 2024); perbedaan sikap Britania Raya dan Jerman terhadap pengungsi (Kok, 2021); proses sekuritisasi migrasi di Britania Raya dan Jerman terjadi akibat sejarah dan politik masing-masing negara (Diez & Squire, 2008); isu pengungsi menjadi alasan Britania Raya keluar dari Uni Eropa (Brexit) (Nurtyandini & Santoso, 2022); sekuritisasi pengungsi oleh Britania Raya melalui kebijakan *hostile environment* (Perez, 2023); sekuritisasi oleh aktor politik Jerman demi agenda politik (Mustaq et al., 2021; Uranga, 2021).

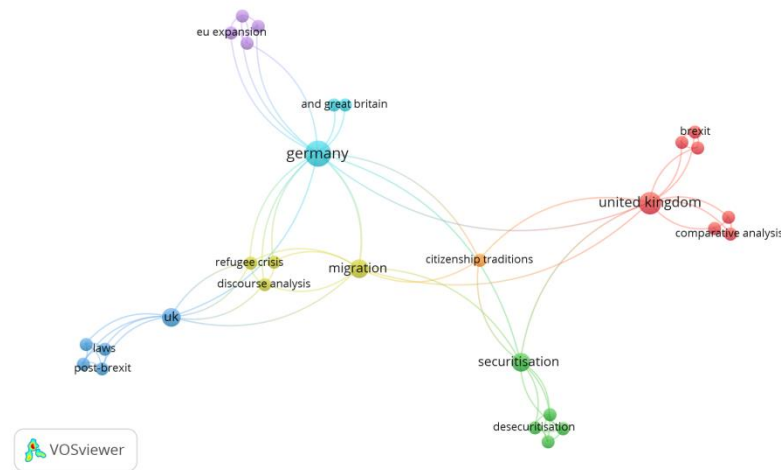
Kesepuluh literatur tersebut kemudian diolah menggunakan Mendeley untuk memperjelas kata kunci yang muncul sehingga analisis lebih akurat. Kemudian, peneliti menggunakan alat bantu VOSviewer untuk menganalisis kepadatan dan jaringan bibliometrik sehingga didapatkan kebaruan atau celah penelitian dari hasil kumpulan data sebelumnya. Berikut visualisasi kepadatan istilah dan jaringan bibliometrik menggunakan VOSviewer ditampilkan pada gambar 2.1 dan gambar 2.2.



Gambar 2.1 Visualisasi kepadatan istilah berdasarkan analisis data bibliometrik menggunakan VOSviewer

Sumber: diolah oleh peneliti melalui aplikasi VOSviewer, 2025

Visualisasi kepadatan istilah (*density*) pada gambar 2.1 mengindikasikan intensitas perhatian akademik terhadap isu pengungsi di Jerman dan Inggris, khususnya pada saat Krisis Pengungsi. Namun, terdapat istilah sekuritisasi pada klauster ‘*refugee crisis*’ yang belum mendapatkan perhatian dari peneliti lain sehingga penting untuk mengkaji sekuritisasi isu pengungsi. Kemudian, peneliti juga menemukan istilah “*securitization*”, “*german national politics*”, dan “*desecuritization*” dalam satu klauster yang mengindikasikan bahwa sekuritisasi pengungsi digunakan sebagai alat politik oleh partai politik Jerman, serta adanya proses penghapusan label ancaman (*desecuritization*). Sedangkan, kedekatan istilah “UK”, “*securitization*”, “*refugee crisis*”, dan “*Brexit*” menunjukkan bahwa terjadi sekuritisasi isu pengungsi di UK yang juga menjadi salah satu penyebab Brexit.



Gambar 2.2 Hasil analisis jaringan bibliometrik berdasarkan data yang diolah melalui VOSviewer

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi VOSviewer, 2025

Visualisasi jaringan bibliometrik (*network*) pada gambar 2.2 menunjukkan struktur jaringan di mana “Germany” dan “Great Britain” memiliki keterhubungan dengan istilah “refugee crisis” dan “securitization”. Keterkaitan istilah ini menunjukkan bahwa isu pengungsi di Jerman dan Inggris berkaitan dengan proses sekuritisasi. Namun, jaringan Jerman masih cukup jauh sehingga kemungkinan persoalan pengungsi belum dianggap sebagai ancaman eksistensial. Berbeda dengan jaringan UK yang cukup dekat sehingga kemungkinan besar telah terjadi sekuritisasi yang menyebabkan referendum Brexit.

Kedua visualisasi di atas memperkuat argumen peneliti bahwa isu migran—termasuk pengungsi—menjadi persoalan penting yang telah mendapatkan perhatian akademik. Namun, masih terdapat kekosongan pada penelitian terkait perbandingan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya mengisi kekosongan kajian terkait sekuritisasi persoalan pengungsi dengan

unit analisis Jerman dan Inggris. Berikut disajikan uraian tinjauan pustaka dari sepuluh jurnal beserta buku yang dipilih atas dasar relevansi dengan topik kajian ini.

Pertama, kajian Anna Lindvall (2015) dalam tesis yang berjudul “*Have Refugees Become A Security Problem? A Comparative Study of Securitization in The United Kingdom and Germany*”, menyoroti bagaimana migrasi transnasional berkorelasi terhadap isu keamanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apa dan bagaimana migrasi transnasional berkaitan dengan isu keamanan ketika “wacana pengungsi” terbentuk. Teori Sekuritisasi digunakan sebagai landasan kajian Lindvall yang berfokus pada proses menjadikan suatu isu politik (pengungsi) sebagai ancaman mendesak untuk melegitimasi suatu tindakan. Selain itu, perbandingan respons kebijakan kedua negara ini dikaji menggunakan pendekatan *Most Similar System Design* (MSSD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Britania Raya terjadi proses sekuritisasi terhadap pengungsi selama krisis pengungsi tahun 2015. Britania Raya melihat pengungsi sebagai ancaman bagi masyarakat asli dan terhadap kedaulatan Britania Raya. Di sisi lain, Jerman tidak melakukan sekuritisasi terhadap isu pengungsi melainkan mengsekuritisasi kelompok nasionalisme dan *xenophobia* karena dapat mengancam keamanan dan juga hubungan diplomatik dengan negara-negara Uni Eropa, serta migran itu sendiri.

Studi komparatif juga dilakukan oleh Christian Joppke (1999) yang membandingkan tiga negara liberal, yaitu Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Britania Raya. Melalui bukunya yang berjudul “*Immigration and The Nation-State*”, Joppke menyoroti perbandingan politik pascaperang di Amerika Serikat, Jerman, dan Britania Raya terkait pengendalian dan integrasi imigrasi. Sejarah dan pengalaman yang berbeda dalam menangani pengungsi berdampak pada respon kebijakan yang diterapkan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ada tekanan internasional, Hak Asasi Manusia (HAM), dan norma internasional yang membuat negara bangsa semakin kehilangan kendali atas imigrasi. Amerika Serikat melalui buku “*A Nation of Immigrants*” karya John F Kennedy menganggap bahwa pembatasan imigran tidak sesuai dengan tradisi AS, yaitu “*All men are created equal*”. Di Jerman terjadi

perubahan historis terkait kebijakan imigrasi yang semulanya hanya diperuntukan bagi etnis Jerman yang tersebar saja. Etnis lain yang ada di Jerman hanya dianggap sebagai “*guestworker*” tanpa hak integrasi penuh. Namun, setelah unifikasi dan runtuhnya kekuasaan komunisme, Jerman menghapuskan batas tersebut dan mengintegrasikan *guestworker* serta keturunannya sebagai bagian dari kewarganegaraan Jerman. Artinya, Jerman merubah citra negara dari penerimaan imigran berdasarkan etnis menjadi terbuka terhadap imigrasi. Di sisi lain, Britania Raya semakin membatasi arus imigran yang masuk dari negara-negara koloninya, seperti India, Pakistan, Kiribia, dan negara-negara Afrika. Sebelumnya Britania Raya memberikan akses mudah untuk imigran dari negara-negara tersebut. Namun, jumlah yang terus meningkat membuat Britania Raya kesulitan menangani imigran tersebut sehingga menerapkan kebijakan pembatasan.

Kajian lanjutan mengenai perkembangan tata kelola dan pemingkanaan migrasi serta pencari suaka sebagai krisis telah dilakukan oleh Mencutek dkk (2022). Kajiannya yang berjudul “*A Crisis Mode in Migration Governance: Comparative and Analytical Insights*”, memfokuskan penelitian pada kasus krisis pengungsi tahun 2015—2016, dengan menawarkan kerangka analisis waktu yang lebih luas, 2011—2018. Penelitian ini melibatkan sebelas negara yang berbatasan langsung dengan Suriah (Lebanon, Irak, dan Turki), negara transit bagi pengungsi (Yunani, Italia, Polandia, dan Hungaria), dan negara tujuan utama pengungsi (Austria, Jerman, Swedia, dan Britania Raya). Melalui metode analisis yang dihasilkan melalui proyek penelitian RESPOND, peneliti menemukan tiga fitur utama dalam tata kelola migrasi pada masa krisis. Pertama, kompleksitas lanskap aktor yang menghubungkan negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kedua, adanya sistem hukum dan kebijakan yang rumit. Ketiga, narasi renasionalisasi yang berupaya menyatukan tata kelola yang terfragmentasi dan multifaset dengan janji negara untuk menyelesaikan krisis.

Kemudian, terdapat studi komparatif yang menyoroti sistem hukum dan kebijakan imigrasi dengan mengeksplorasi kompleksitas tata kelola imigrasi dalam berbagai konteks sosial-politik. Kajian ini dikaji oleh Siddiqui (2024) dengan judul

“A Comparative Analysis of Immigration Laws: Case Studies of the Canada, Germany, the United States of America (USA), and the United Kingdom (UK)”. Peneliti melihat bahwa kebijakan imigrasi adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara sejarah, sistem hukum, tujuan kebijakan, dan persepsi masyarakat. Hasil kajian ini didapat dari studi perbandingan antara Kanada, Jerman, AS, dan Britania Raya yang memiliki tantangan imigrasi serupa, tapi berbeda dalam merespons persoalan yang ada. Perbedaan kebijakan ini disesuaikan dengan prioritas nasional dan sosial-politik masing-masing negara. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa aspek sejarah, hukum, kebijakan, dan strategi interaksi berperan penting dalam menyusun kebijakan untuk menangani dan mengatur imigrasi.

Selain itu, terdapat kajian perbedaan sikap migrasi di Jerman dan Britania Raya di tahun 2002 dan 2016, yang dikaji oleh Kok (2021). Dalam tesisnya yang berjudul *“Migration Attitudes in Germany and the UK in Times of Change: A Quantitative Study Comparing Attitudes Toward Migration in 2002 and 2016”* (Kok, 2021), Kok, menunjukkan bahwa tahun 2016 sikap Jerman dan Britania Raya lebih positif dibandingkan tahun 2002. Selain itu, Jerman lebih terbuka dan memiliki sikap lebih positif dibandingkan dengan Britania Raya. Pemilihan tahun 2002 dan 2016 didasari atas peristiwa sebelum ekspansi EU yang diprediksi akan meningkatkan imigran dan 2016 terjadi referendum Brexit pada masa krisis pengungsi tahun 2015. Penelitian ini juga menyoroti faktor yang memengaruhi sikap positif dan negatif terhadap migran. Pendidikan dan pendapatan mampu berdampak positif terhadap migran, sedangkan usia dan orientasi politik tertentu (konservatif) cenderung berdampak negatif (Kok, 2021).

Terdapat pula kajian komparatif antara Jerman dan Britania Raya terkait migrasi yang berkaitan dengan tradisi kewarganegaraan. Diez dan Squire (2008) dalam kajiannya yang berjudul *“Traditions of Citizenship and the securitization of Migration in Germany and Britain”*, menyoroti bahwa proses sekuritisasi yang terjadi di Jerman dan Britania Raya dilatarbelakangi oleh tradisi kewarganegaraan masing-masing negara (Diez & Squire, 2008). Tradisi kewarganegaraan memainkan

peranan penting dalam menentukan interaksi masyarakat asli dan migran. Meskipun, terdapat proses harmonisasi hukum antara negara anggota Uni Eropa, sejarah dan politik tetap memainkan peranan penting dalam membentuk cara pandang masing-masing negara terhadap migran.

Penelitian Nurtyandini dan Santoso (2022) dalam artikel jurnal yang berjudul “*The Impact of the BREXIT Referendum on European Union Immigration Policy in the UK*”, menyoroti permasalahan imigrasi di Britania Raya yang berdampak pada Brexit (Nurtyandini & Santoso, 2022). Sebagai negara anggota Uni Eropa (EU), Britania Raya wajib menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh EU. Salah satu kebijakan yang harus diterapkan oleh Britania Raya adalah *open door immigration policy*. Kebijakan ini menerapkan sistem kewarganegaraan Uni Eropa yang membebaskan pergerakan di wilayah negara anggota. Adanya kebijakan ini, Britania Raya terpaksa membuka perbatasan dan menyebabkan peningkatan imigran yang masuk. Adanya permasalahan ini juga terjadi karena ketiadaan pengawasan terhadap arus masuk imigran di Britania Raya. Akibatnya, Britania Raya memutuskan untuk referendum Brexit tahun 2016 dan resmi keluar dari Uni Eropa tahun 2020 (Nurtyandini & Santoso, 2022). Brexit berdampak pada kemandirian Britania Raya untuk bisa membuat kebijakannya secara mandiri, khususnya berkaitan dengan imigran. Hasilnya Britania Raya berencana menerapkan kebijakan Australia yang cukup ketat dalam proses penyeleksian imigran dari negara non-Uni Eropa. Selain itu, untuk negara Uni Eropa, Britania Raya akan menetapkan batas izin tinggal supaya imigran dapat mengatur izin tinggal dan pekerjaan secara mandiri di Britania Raya (Nurtyandini & Santoso, 2022).

Kebijakan ketat Britania Raya terhadap imigran melalui kebijakan *Hostile Environment* dan hubungannya dengan eksternalisasi suaka telah dikaji oleh Perez (2023). Kajiannya yang berjudul “*The Securitization of Asylum: A Review of UK Asylum Laws Post-Brexit*”, akan melihat bagaimana Undang-Undang Kewarganegaraan dan Perbatasan tahun 2022 dan UK-Rwanda MoU memperkuat eksternalisasi suaka pasca-Brexit (Perez, 2023). Kajian ini juga fokus pada

sekuritisasi dan bagaimana *hostile environment* mengecualikan pencari suaka dari akses terhadap HAM, serta bertentangan dengan Konvensi Pengungsi 1951. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi eksternalisasi Britania Raya bertentangan dengan hukum internasional dan regional (ECHR) (Perez, 2023). Kebijakan UU Kewarganegaraan dan Perbatasan tahun 2022 dan MoU UK-Rwanda memungkinkan perpindahan pencari suaka ke tempat yang mungkin tidak memiliki keterkaitan dengan pencari suaka tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *non-refoulement*. Kemudian, kebijakan *hostile environment* yang mengkaburkan perbedaan imigran tidak berdokumen dan pencari suaka sebagai agenda sekuritisasi dapat berdampak pada pembatasan hak-hak migran (Perez, 2023).

Kajian selanjutnya berfokus pada implikasi krisis pengungsi terhadap politik nasional Jerman. Penelitian ini ditulis oleh Mustaq et al (2021) dengan judul "*Securitisation of the Refugee Issue in Germany: The Far Right Challenge to Government Policies*" (Mustaq et al., 2021). Ketika Krisis Pengungsi tahun 2015, Jerman, melalui kebijakan *open door immigration policy*, mengizinkan lebih dari satu juta pengungsi Suriah datang ke Jerman. Hal ini menjadikan tantangan bagi kebijakan Pemerintah Jerman karena menimbulkan pro dan kontra di beberapa partai politik. Kajian ini menggunakan teori sekuritisasi dan desekuritisasi milik Barry Buzan dan Ole Waever untuk menilai peran aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi dan desekuritisasi di Jerman. Hasilnya *The Alternative for Germany* (AfD), *Christian Social Union* (CSU), dan *Pegida movement* merupakan aktor yang mensekuritisasikan isu pengungsi dengan narasi pengungsi sebagai ancaman eksistensial bagi Jerman. Di sisi lain, aktor desekuritisasi seperti *Christian Democratic Union*, *Green Party*, *the Left Party*, dan *Social Democratic Party* menganggap bahwa pengungsi bukan sebagai ancaman, melainkan kesempatan ekonomi bagi Jerman.

Sekuritisasi isu imigran di Jerman, khususnya terkait dengan Krisis Pengungsi tahun 2015 dikaji oleh Uranga (2021) dalam jurnal yang berjudul "*Securitizing Immigrants: Applying Securitization Theory in German Politics*" (Uranga, 2021).

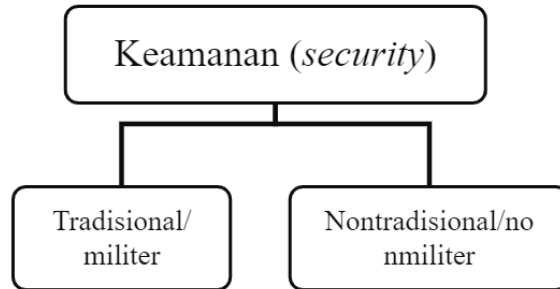
Kajian ini melihat bahwa AfD memanfaatkan isu pengungsi sebagai agenda politik untuk meraih suara pada pemilihan federal tahun 2019. Kajian ini menggunakan konsep sekuritisasi milik Barry Buzan dan Ole Wæver untuk menunjukkan bagaimana AfD melakukan sekuritisasi pengungsi dalam agenda politiknya. Pendekatan yang digunakan adalah menganalisis berbagai sumber terkait pernyataan mengenai imigrasi (manifesto partai politik) dan menganalisis platform kebijakan yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa AfD telah berhasil menggunakan strategi sekuritisasi untuk memperkuat posisinya dalam politik. AfD menggambarkan imigrasi dan pengungsi sebagai ancaman yang dapat mengancam identitas nasional Jerman. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah pendukung AfD yang mulanya hanya 2 juta suara di tahun 2013 menjadi 4 juta suara di tahun 2017.

Penelitian terdahulu yang telah disajikan pada paragraf sebelumnya memiliki pendekatan dan metode yang sama dengan penelitian ini, yaitu kualitatif deskriptif. Selain itu, terdapat kesamaan pendekatan MSSD yang digunakan untuk membandingkan proses sekuritisasi dari dua negara yang secara umum memiliki karakteristik serupa. Namun, tentu terdapat perbedaan dalam segi substansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang berfokus pada sekuritisasi pengungsi, secara spesifik di Jerman dan Inggris.

2.2 Landasan Konseptual

Kajian keamanan telah mengalami perluasan dimensi sejak munculnya agenda ekonomi dan lingkungan di tahun 1970-an dan 1980-an, serta terdapat perhatian pada isu identitas dan kejahatan transnasional di tahun 1990-an (Buzan et al., 1998). Perluasan kajian keamanan tidak lepas dari munculnya berbagai ancaman nonmiliter, seperti isu pengungsi, terorisme, dan kejahatan transnasional yang kemudian memunculkan aktor lain selain negara. Pemikiran Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde tidak serta-merta menyingkirkan ancaman keamanan tradisional atau yang

berfokus pada ancaman militer dengan aktor utama adalah negara. Sektor militer tetap menjadi bagian penting dari lima sektor yang dikemukakan oleh tiga pemikir tersebut, diantaranya sektor militer (invasi), politik (propaganda), ekonomi (embargo), *societal* (isu pengungsi), dan lingkungan (krisis iklim) (Buzan et al., 1998).



Gambar 2.3 perluasan kajian keamanan dalam Hubungan Internasional

Sumber: diolah oleh peneliti dari (Buzan et al., 1998) menggunakan Xmind, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa kajian keamanan terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu tradisional dan nontradisional. Buzan, Ole, dan Wilde memperkenalkan teori sekuritisasi yang dipengaruhi oleh paradigma konstruktivis dan termasuk kajian keamanan nontradisional (Buzan et al., 1998). Sekuritisasi merujuk pada proses membingkai suatu isu sebagai ancaman eksistensial (*existential threat*) yang membutuhkan tindakan luar biasa—tindakan dapat dilakukan tanpa melalui prosedur demokrasi dan hukum normal. Proses ini melibatkan khalayak umum untuk menerima dan yakin bahwa isu ‘tersebut’ adalah isu keamanan sehingga membenarkan tindakan yang diambil oleh pihak berwenang/pemerintah.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori sebagai kerangka analisis (*framework*) untuk menyederhanakan pemahaman terkait fenomena pengungsi yang rumit. Teori sekuritisasi milik Buzan, Ole, dan Wilde digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan persoalan pengungsi di Jerman dan Inggris. Teori ini penting bagi peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian pada bab pendahuluan.

2.2.1 Teori Sekuritisasi

Sekuritisasi pada dasarnya adalah proses mengkonstruksikan suatu isu secara terus-menerus oleh aktor sekuritisasi yang kemudian diterima oleh target audiens (Buzan et al., 1998; Shah, 2024). Buzan memberikan kerangka analisis yang jelas dalam buku “*Security: A New Framework for Analysis*” untuk menganalisis suatu isu menjadi isu keamanan. Dalam bukunya, Buzan mengidentifikasi dua hal penting, yaitu entitas yang terancam (*referent object*) dan entitas yang mengancam (*perceived threat*) (Buzan et al., 1998; Shah, 2024). Kedua hal ini penting diidentifikasi karena sebagai fondasi bagi aktor sekuritisasi untuk membangun argumen sekuritisasi.

Argumen sekuritisasi tersebut dikonstruksikan melalui *speech act* untuk meyakinkan target audiens bahwa suatu isu—dalam hal ini pengungsi—merupakan ancaman eksistensial (Buzan et al., 1998; Shah, 2024). Ketika narasi sekuritisasi diterima oleh audiens maka dapat memberikan legitimasi untuk melakukan tindakan luar biasa bahkan penggunaan militer. Pada gambar 1.1 penulis menyajikan kerangka analisis yang akan digunakan untuk menganalisis sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris.

Tabel 1. 1 Kerangka Analisis menggunakan Teori Sekuritisasi Buzan, Ole, dan Wilde

Kerangka Analisis Sekuritisasi Buzan			
Membingkai ancaman eksistensial	Speech Acts	Respons kebijakan	Normalisasi
Pembingkiaan suatu	<i>Speech</i> merupakan	<i>act</i> proses	Respons kebijakan adalah tahap di
			Bagian ini mencakup

Kerangka Analisis Sekuritisasi Buzan

Membingkai ancaman eksistensial	Speech Acts	Respons kebijakan	Normalisasi
merupakan langkah penting dalam proses pembingkaiannya. Bukan sekedar menyampaikan informasi, melainkan proses politik untuk mengubah pandangan terhadap suatu isu atau masalah sebagai ancaman eksistensial yang mengancam <i>referent object</i> .	di mana aktor mana yang menggunakan kekuatan kata-kata untuk meyakinkan publik bahwa suatu isu merupakan ancaman signifikan terhadap keamanan negara dan masyarakat. Narasi-narasi sekuritisasi tersebut dilakukan secara terus menerus agar pemerintah mendapatkan legitimasi untuk mengambil tindakan diluar hukum normal.	mana “ancaman” yang sudah dibicarakan berubah menjadi “tindakan” nyata. Hal ini juga dapat dipersepsikan sebagai keberhasilan aktor sekuritisasi dalam membingkai suatu permasalahan.	normalisasi respons dan tindakan negara oleh audiens terhadap suatu persoalan yang menjadi ancaman eksistensial (Shah, 2024). Respons dan tindakan seperti <i>hostile environment</i> dan penutupan border bagi imigran dianggap sebagai bagian normal dari kebijakan publik. Penerimaan audiens juga dapat memberikan legitimasi terhadap tindakan luar biasa tersebut.

Sumber: (Shah, 2024) dan diolah oleh peneliti, 2026

Ketika suatu isu telah melewati proses tersebut, maka isu tersebut berada pada level disekuritisasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Buzan, Ole, dan Wilde bahwa terdapat tingkatan variasi intensitas suatu isu dianggap sebagai agenda diskusi biasa atau sudah di tahap mobilisasi sumber daya dan menormalisasikan tindakan luar biasa (Buzan et al., 1998). Tabel 1.2 menunjukkan tiga tingkatan suatu isu apakah hanya sebagai diskusi bisas (tidak dipolitisasi), dipolitisasi, atau disekuritisasi.

Tabel 1. 2 Tiga tingkatan dalam spektrum sekuritisasi Barry Buzan

Spektrum Sekuritisasi Barry Buzan		
Tidak dipolitisasi	Dipolitisasi	Disekuritisasi
Isu hanya menjadi bahan diskusi biasa, tidak ditangani oleh negara, dan tidak diperdebatkan secara publik.	Isu dikelola dalam standar sistem politik yang normal membutuhkan perdebatan parlementer, diskusi publik, dan keputusan pemerintah. Penanganan isu harus melewati birokrasi dan hukum normal (dapat berupa isu yang bukan prioritas).	Isu dibingkai sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan/respons yang cepat (prioritas). Tindakan yang diambil dapat dilakukan tanpa standar sistem politik yang normal.
Aktor sekuritisasi mengidentifikasi isu atau fenomena yang akan didiskusikan. Tahap ini hanya sekedar diskusi	Aktor sekuritisasi membingkai isu sebagai ancaman eksistensial dengan menggunakan bahasa dan retorik	Aktor sekuritisasi dapat menggunakan otoritas dan kewenangan untuk memobilisasi sumber daya guna menangani isu

Spektrum Sekuritisasi Barry Buzan

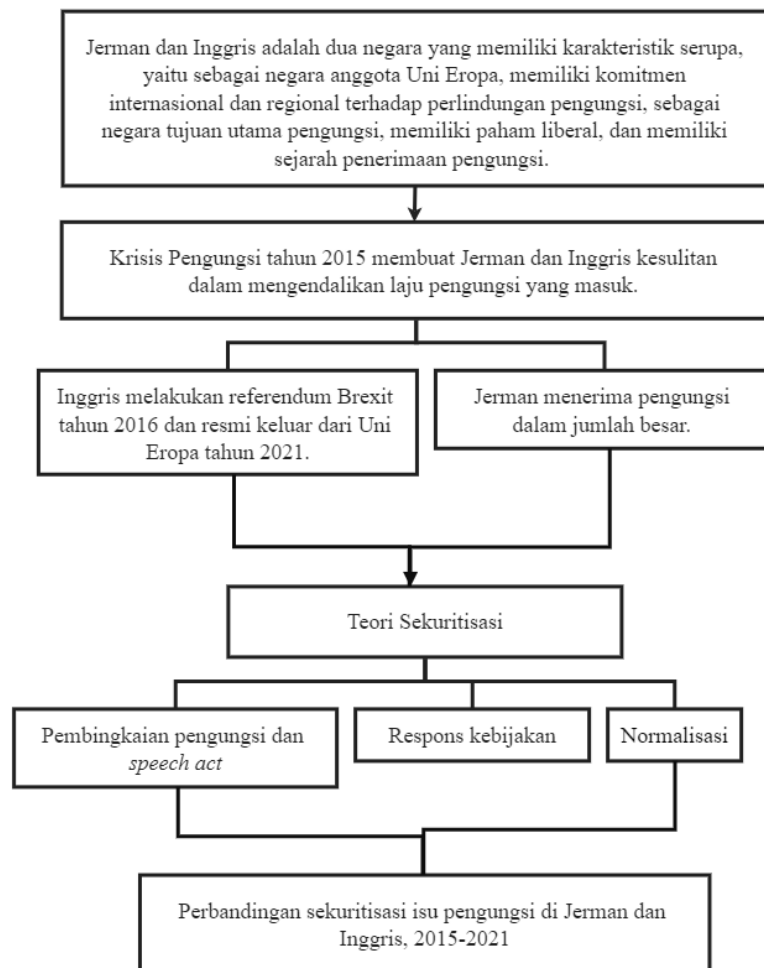
Tidak dipolitisasi	Dipolitisasi	Disekuritisasi
tanpa membingkai dan ‘mengerikan’. menggunakan retorika yang mengerikan.	Sikap yang dimiliki aktor politik dapat meyakinkan masyarakat untuk mengambil tindakan yang serius dan mendesak.	Sikap yang disekuritisasi. Terdapat proses normalisasi tindakan luar biasa yang dikeluarkan oleh pemerintah.
		Isu yang disekuritisasi juga dapat didesekuritisasikan.

Sumber: (Shah, 2024) dan diolah oleh peneliti, 2025

Melalui teori sekuritisasi, peneliti dapat menganalisis persoalan dan perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris. Suatu persoalan yang telah masuk dalam agenda politik dan dianggap sebagai ancaman eksistensial dapat menjadi prioritas untuk mengambil tindakan luar biasa. Penerimaan tersebut kemudian menjadikan respons dan tindakan suatu negara dianggap wajar dan normal oleh audiens atau masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kajian ini menggunakan kerangka pemikiran guna menciptakan pola berpikir yang dapat memvisualisasikan persoalan pengungsi di Jerman dan Inggris pada tahun 2015—2021. Kerangka berpikir juga dapat membantu peneliti untuk menyederhanakan suatu fenomena yang rumit, serta menekankan prinsip-prinsip penelitian yang berfokus pada sekuritisasi, studi perbandingan, dan isu pengungsi di Jerman dan Inggris.



Gambar 2. 4 Kerangka pemikiran penelitian

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan alat bantu Xmind, 2025

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menyajikan metodologi penelitian untuk membantu memudahkan menganalisis atau mengkaji persoalan pengungsi di Jerman dan Inggris. Peneliti membagi bab ini menjadi lima bagian utama, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan MSSD. Data dihimpun dari pelbagai sumber utama, diantaranya jurnal, buku, laporan AIDA, laporan IOM, lembaga *Think Thank Migration Watch UK*, dan publikasi media massa. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik analisis studi pustaka yang kemudian data dianalisis menggunakan teknik reduksi data dan triangulasi data. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi, gambar, maupun tabel.

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam melakukan analisis data. Metode ini dipilih lantaran peneliti adalah instrumen utama yang mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang sudah terkumpul (Creswell & Creswell, J, 2018). Selain itu, metode ini dapat membantu peneliti untuk mengeksplorasi fenomena pengungsi di dua negara secara detail dan kronologis. Adapun analisis dan argumen yang dibangun oleh peneliti didasarkan oleh data, fakta, dan alat analisis teori sekuritisasi milik Barry Buzan, Ole, dan Wilde dari Mahzab *Copenhagen*.

Creswell menjabarkan pendekatan *narrative research*, *phenomenological research*, *grounded theory*, *ethnography*, dan *case studies* (Creswell & Creswell, J, 2018). Berdasarkan kebutuhan peneliti, *case studies* menjadi pendekatan yang paling cocok digunakan untuk membantu peneliti mengeksplorasi fenomena pengungsi di masing-masing unit analisis—Jerman dan Inggris—secara detail dan kronologis. Pendekatan ini mampu membantu menjelaskan jaringan pengungsi yang terbentuk, jumlah pengungsi yang datang dan diterima, serta dampak terhadap keamanan Jerman dan Inggris. Sifat pendekatan studi kasus yang mendalam dan kronologis juga dapat membantu peneliti untuk mendeskripsikan kebijakan masing-masing negara pada batas periode 2015 sampai 2021.

Selain itu, kajian ini merupakan kajian perbandingan yang membutuhkan pendekatan lain untuk mempertajam analisis. Peneliti menggunakan pendekatan *Most Similar Systems Design* (MSSD) yang digunakan untuk membandingkan proses sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris. Pendekatan ini juga dapat membantu peneliti untuk mengkaji lebih dalam dua negara yang secara umum memiliki karakteristik yang sama, tetapi hasil respons terhadap persoalan pengungsi dapat sangat berbeda (Anckar, 2008; Lindvall, 2016).

Dalam mengaplikasikan pendekatan ini, peneliti menelusuri kasus di masing-masing unit analisis terkait isu pengungsi. Lalu, peneliti mendapatkan dua respons berbeda; di mana Inggris menginterpretasikan pengungsi sebagai ancaman eksistensial, sedangkan Jerman menerima dengan kebijakan *welcome refugee*. Setelah itu, peneliti melakukan penelusuran terkait karakteristik kedua negara ini. Peneliti menemukan bahwa keduanya merupakan negara anggota Uni Eropa, berkomitmen secara internasional melalui Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, negara yang memiliki paham liberal, dan memiliki sejarah yang sama terhadap penerimaan pengungsi. Setelah mendapatkan fondasi tersebut, peneliti mengaplikasikan metode kualitatif deskriptif melalui langkah-langkah yang telah dijabarkan oleh Creswell dalam bukunya (Creswell & Creswell, J, 2018).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus kajian ini ialah membahas bagaimana perbandingan sekuritisasi isu pengungsi pada kasus Jerman dan Inggris menggunakan teori sekuritisasi Buzan, Ole, Wilde. Peneliti memfokuskan kajian pada rentang waktu tahun 2015 sampai dengan 2021. Alasannya ialah karena tahun 2015 merupakan titik awal kedatangan pengungsi yang masif hingga disebut sebagai krisis pengungsi, sedangkan tahun 2021 merupakan batas Inggris menjadi anggota resmi Uni Eropa. Pada rentang periode tersebut peneliti dapat membandingkan dua negara yang memiliki karakteristik yang sama terkait isu pengungsi. Alasan lain peneliti memilih kajian ini karena belum banyak kajian yang membahas terkait perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris menggunakan alat potret sekuritisasi Buzan dan pada rentang waktu 2015—2021.

Selain kajian ini membahas perbandingan sekuritisasi pada rentang waktu tersebut, peneliti juga dapat membahas persoalan pengungsi di masing-masing negara sehingga mampu memberikan gambaran pengungsi yang detail. Pembahasan tersebut meliputi, alasan masing-masing negara menerima pengungsi di tahun 2015, jumlah pengungsi yang diterima, dampak penerimaan pengungsi, sampai kebijakan yang dijalankan oleh masing-masing negara.

Kajian ini menggunakan alat portrait teori sekuritisasi yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan dan perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris. Teori ini mampu memfasilitasi peneliti dengan mengidentifikasi kelompok yang terancam (*referent object*), kelompok yang mengancam (*perceived threat*), aktor sekuritisasi, pembingkaiian pengungsi, *speech acts*, respons kebijakan, dan tindakan normalisasi. Selain itu, teori ini dapat membantu peneliti untuk menguraikan dan menganalisis perbandingan kedua negara dalam merespons isu pengungsi dan dampaknya dalam konteks regional. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan respons dan tindakan antara Jerman dan Inggris. Dengan memfokuskan kajian pada

sekuritisasi isu pengungsi di dua negara Eropa Barat, peneliti berharap mampu menjawab pertanyaan penelitian secara deskriptif dan detail.

3.3 Sumber Data

3.3.1. Sumber *Litelature*

Sumber litelatur kajian ini berasal dari sumber utama yang dihimpun menggunakan alat bantu *Publish or Perish* (PoP). Data litelatur dihimpun berdasarkan kata kunci yang menjadi batasan untuk memahami perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris tahun 2015—2021. Batas tahun juga digunakan untuk menghadirkan data litelatur yang relevan. Sumber data juga didapatkan dari media massa, lembaga *Think Tank*, dan *website* resmi Pemerintah Inggris dan Jerman. Pelbagai sumber digunakan untuk menghadirkan perspektif kritis dan alternatif terkait sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris

3.3.2. Strategi Pencarian

Peneliti menggunakan strategi pencarian milik Creswell, di mana perlu melakukan pengumpulan data untuk kemudian dikondensasi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan alat bantu *Publish or Perish* (PoP) untuk menghimpun berbagai artikel jurnal secara efektif dan efisien. Peneliti kemudian mendapatkan 10 litelatur yang relevan untuk membangun pertanyaan penelitian dan argumen awal penelitian. Peneliti kemudian memunculkan permasalahan riset terkait bagaimana perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris tahun 2015—2021. Tahap selanjutnya peneliti memilih sumber utama yang berkaitan dengan persoalan pengungsi dan perbandingan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris. Data dihimpun dari rentang tahun 2015—2021 sebagai batas dari awal Krisis Pengungsi 2015 sampai Inggris resmi keluar dari Uni Eropa.

Peneliti kemudian mengumpulkan data yang dianggap relevan dengan penelitian dari sumber utama yang kredibel, seperti situs resmi Pemerintah UK (gov.uk), lembaga *think tank* (*Migration Watch UK*), *Journal of Global Strategic Studies*, IOM, *Asylum Information Database (AIDA) country Germany*, *The Guardian*, *European Convention on Human Rights*, *The Federal Government*, dan laporan AfD. Data tersebut didapatkan atas dasar kata kunci yang digunakan oleh peneliti “Germany” “refugee” “securitization” dan “UK”. Setelah data terhimpun, peneliti kemudian menyortir sumber berdasarkan unit analisis, batas waktu, kata kunci, *speech act*, dan tujuan akhir.

Tabel 3. 1 Kriteria pemilihan sumber data

Unit Analisis	Jerman dan Inggris terkait sekuritisasi pengungsi
Batas Waktu	Tahun 2015—2021
Kata Kunci	“sekuritisasi”, “Jerman”, “Inggris”, “pengungsi”, “Brexit”, dan “Krisis Pengungsi tahun 2015”
<i>Speech Act</i>	Aktor sekuritisasi Jerman dan Inggris
Hasil/ tujuan akhir	Memahami persoalan umum pengungsi di masing-masing negara dan membandingkan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026

3.3.3. Seleksi Litelatur

Litelatur yang telah dikumpulkan akan disortir kembali menggunakan metode triangulasi data milik Creswell (Creswell & Creswell, J, 2018). Peneliti memastikan

sumber data berasal dari lebih satu sumber untuk menjustifikasi argumen yang disajikan. Penjelasan inklusi disajikan untuk memasukan artikel yang relevan dengan kajian, sedangkan penjelasan eksklusi disajikan agar peneliti tidak memasukkan artikel tersebut.

Tabel 3. 2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Unit Analisis	Jerman dan Inggris terkait sekuritisasi pengungsi dan respons kebijakan	Selain Jerman dan Inggris yang berkaitan dengan sekuritisasi pengungsi
Batas Waktu	Tahun 2015—2021	Tidak dalam rentang periode tersebut
Kata Kunci	“sekuritisasi”, “Jerman”, “Inggris”, “pengungsi”, “Brexit”, dan “Krisis Pengungsi tahun 2015”	Sekuritisasi selain di Jerman dan Inggris, pengungsi selain di Jerman dan Inggris, dan Krisis Pengungsi tahun 2015 selain di Jerman dan Inggris
<i>Speech Act</i>	Aktor sekuritisasi dan aktor desekuritisasi	Selain aktor sekuritisasi dan desekuritisasi di Jerman dan Inggris
Hasil/tujuan akhir	Gambaran umum pengungsi, proses sekuritisasi, dan respons kebijakan pengungsi di Jerman dan Inggris	Selain gambaran umum pengungsi, proses sekuritisasi, dan respons kebijakan pengungsi di Jerman dan Inggris

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, kriteria inklusi dan eksklusi disajikan untuk memastikan dan menjaga konsistensi dari penelitian ini. Peneliti juga menghimpun sumber utama dari YouTube Fox News, phoenix, dan UNHCR untuk melihat *speech act* aktor sekuritisasi di Jerman dan Inggris. Selain YouTube, peneliti juga menggunakan sumber utama dari *website* resmi lembaga *Think Tank*, Pemerintahan, media massa, dan NGO untuk menganalisis pbingkaian pengungsi yang dilakukan. Data tersebut mencakup mencakup *International Organization for Migration* (www.iom.int), *UNHCR* (www.unhcr.org), *European Union Agency for Asylum* (<https://euaa.europa.eu>), *Government United Kingdom* (www.gov.uk), *Migration Watch UK* (www.migrationwatchuk.org), *PRO ASYL* (www.proasyl.de), *Terre des homes* (<https://terredeshommes.org>), *UK Parlement* (committees.parliament.uk), *The Guardian* (www.theguardian.com), dan *Al Jazeera* (www.aljazeera.com).

Selain itu, beragam sumber data digunakan, seperti data dari *Asylum in Europe*, *Asylum Statistic*, *Asylum Information Database*, *Federal Office for Migration and Refugee*, dan *European Union Agency for Asylum*. Data tersebut digunakan untuk meminimalkan bias sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris dari sudut pandang yang beragam. Dengan memadukan sumber yang dihimpun, kajian ini mendukung metode kualitatif deskriptif yang berbasis kajian pada penelitian terdahulu. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami bagaimana perbandingan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris yang dapat dilihat dari tindakan dan respons masing-masing negara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan mempelajari sumber utama dari dokumen, jurnal, laporan resmi terkait pengungsi yang diterima oleh Jerman dan Inggris, *website* lembaga *Think Tank*, YouTube dan

media massa untuk menganalisis *speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi. Adapun data yang dikumpulkan melalui kriteria inklusi yang sudah dijelaskan pada tabel 3.2 untuk memudahkan peneliti mencari data yang relevan dan tetap pada batas penelitian. Menurut Creswell (2018) hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah mengetahui batasan sumber data yang akan digunakan (Creswell & Creswell, J, 2018). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada batas kajian yang telah ditentukan sehingga fokus penelitian tetap terarah pada tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti membatasi sumber data pada kajian mengenai sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris pada rentang waktu 2015—2021.

Selama proses melakukan studi pustaka, peneliti menemukan ratusan dokumen yang bersinggungan dengan topik sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris. Setelah data dipilih sesuai dengan kriteria inklusi, peneliti kemudian melakukan kategorisasi yang berkaitan dengan pemingkanaan dan *speech act* aktor sekuritisasi. Pertama, pidato yang disampaikan oleh aktor negara, seperti Angela Merkel, David Cameron, Suella Braverman, dan Theresa May. Kedua, *speech act* yang dilakukan oleh partai politik, seperti AfD dan CSU. Ketiga, narasi sekuritisasi yang muncul dari lembaga *think tank* (*Migration Watch UK*), masyarakat sipil (gerakan anti-islam PEGIDA dan *Vote Leave*), dan media massa (*The Guardian*, *die tageszeitung*, dan *Terre des homes*). Dari data dan kategorisasi ini peneliti mendapatkan data aktor sekuritisasi dan desekuritisasi di Jerman, sedangkan di Inggris hanya ada aktor sekuritisasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah terhimpun dari pelbagai sumber kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kondensasi data. Kondensasi data digunakan untuk menyederhandakan data, mengorganisasikan data, dan memfokuskan data mentah agar menjadi terstruktur dan mudah dipahami (Miles B. et al., 2014). Tahap

kondensasi juga dapat memberikan makna pada data yang diperoleh. Peneliti melakukan kondensasi data dari situs resmi Pemerintah Jerman (*Bundesministerium des Innern*), Pemerintah Inggris (Government UK), AIDA, dan sumber daring lainnya untuk memperoleh data yang spesifik bagi kebutuhan analisis. Selain kondensasi data pada situs resmi, peneliti juga menggunakan sumber audiovisual, seperti YouTube Fox News dan phoenix untuk menganalisis *speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi.

Data yang sudah direduksi kemudian dianalisis menggunakan alat analisis teori sekuritisasi milik Buzan, Ole, dan Wilde. Kemudian, data yang telah dielaborasi disajikan dalam bentuk tabel, gambar, dan narasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian, untuk meminimalisir subjektivitas pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik analisis triangulasi data. Triangulasi data dapat membangun justifikasi yang terstruktur terhadap topik yang dipilih—dalam hal ini sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris (Creswell & Creswell, J, 2018). Hal ini dikarenakan adanya penggunaan beberapa sumber data yang kredibel untuk mengembangkan pemahaman yang inklusif mengenai fenomena yang diangkat (Patton, 1999; Denzin, 1978).

Tahap awal, peneliti melakukan identifikasi terhadap sumber yang digunakan dengan mengecek secara sadar dari mana sumber itu berasal. Kemudian, sumber yang sudah terhimpun dikategorisasikan menjadi data inklusi dan eksklusi (tabel 3.2). Hal ini memudahkan peneliti untuk menggabungkan data yang dihimpun untuk membentuk suatu pemahaman terhadap fenomena sekuritisasi pengungsi. Tahap akhir, peneliti mengelaborasi dan menyajikan data untuk menciptakan gagasan dasar dalam membentuk argumen penelitian. Argumen dari analisis triangulasi data didasari oleh landasan analisis teori sekuritisasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, argumen yang dibangun melalui triangulasi data dapat lebih valid, logis, dan kredibel.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. Peneliti akan menegaskan kembali jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah diuraikan pada bagian pendahuluan. Peneliti juga menguraikan secara singkat terkait proses sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris. Kemudian, saran diajukan kepada pihak terkait, khususnya para pengkaji Hubungan Internasional yang memiliki fokus kajian pada studi keamanan.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji persoalan pengungsi dan proses sekuritisasi pengungsi yang berfokus pada dua negara Eropa, yaitu Jerman dan Inggris di tahun 2015—2021. Hasil dari pembahasan ini menegaskan bahwa puncak persoalan pengungsi terjadi pada tahun 2015 sebagai akibat dari ketidakstabilan politik dan ekonomi di Timur Tengah. Penerimaan pengungsi di Jerman dilatarbelakangi oleh permasalahan demografi sehingga Jerman membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan, Inggris menerima pengungsi sebagai kewajiban negara anggota Uni Eropa untuk menerapkan kebijakan *open door immigration policy*. Namun, karena dampak yang dirasakan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima, persepsi kedua negara terhadap pengungsi akhirnya berubah.

Hasil pembahasan selanjutnya menekankan bahwa proses sekuritisasi di Inggris lebih konsisten dibandingkan dengan proses sekuritisasi pengungsi di Jerman. Persepsi Jerman cenderung mengalami pergeseran dari penyebutan pengungsi sebagai ‘korban’ menjadi suatu ‘ancaman’ terhadap identitas dan budaya Jerman. Sedangkan,

Inggris secara konsisten memandang pengungsi sebagai ancaman bagi kedaulatan negara.

Pembingkaiian pengungsi di Jerman dilakukan oleh partai politik, seperti AfD dan CSU, serta gerakan masyarakat sipil anti-Islam PEGIDA. Sementara, Merkel, Özugus, media *Die Tageszeitung*, PRO AYSL, dan Terre des homes menggunakan narasi desekuritisasi, meskipun di tahun 2017 Merkel kemudian mengkategorisasikan pengungsi menjadi ‘legal’ dan ‘ilegal’. Sebanyak 51% penduduk Jerman khawatir terhadap pengungsi yang dipandang sebagai ancaman eksistensial. Hal ini kemudian mendorong terciptanya tindakan luar biasa, seperti kebijakan *masterplan migration*, kerja sama Uni Eropa dengan Turki untuk membatasi pergerakan pengungsi, *Asylum Package I dan II*, menolak pengungsi yang berasal dari negara aman, kriminalisasi pengungsi, dan bahkan deportasi.

Sedangkan, Inggris secara konsisten menerapkan kebijakan restriktif sejak awal Krisis Pengungsi tahun 2015. Inggris bahkan mengambil tindakan luar biasa, yaitu melakukan referendum Brexit tahun 2016 dan resmi keluar di tahun 2021. Sejak saat itu, Inggris secara independen dapat mengatur kebijakan migrannya sendiri tanpa terikat dengan aturan Uni Eropa. Beberapa kebijakan Inggris sejak referendum Brexit diantaranya, *Immigration Act 2016*, bekerja sama dengan Prancis untuk meningkatkan keamanan di perbatasan, membentuk *Border Security Commander* dan menggunakan militer, *blockade tactic* dan *hostile environment* sejak 2012.

Penelitian ini kemudian menekankan bahwa proses sekuritisasi pengungsi di Inggris terjadi lebih awal dan konsisten. Sedangkan, Jerman mengalami proses pergeseran tindakan dan kebijakan yang awalnya bersikap ramah (*welcoming culture*) menjadi lebih restriktif melalui penutupan jalur Balkan, perjanjian Uni Eropa-Turki, penerapan *masterplan migration* yang bertujuan untuk membatasi jumlah migran, bahkan deportasi. Tindakan ini menunjukkan keberhasilan proses pembingkaiian (*framing*) pengungsi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi negara, NGO, masyarakat sipil, lembaga *Think Thank*, dan media massa. Pembingkaiian tersebut mendorong

pemerintah untuk mengambil tindakan luar biasa atau mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat terhadap pengungsi.

Argumen analisis tersebut dibangun atas dasar teori sekuritisasi milik Buzan, Ole, dan Wilde. Berdasarkan analisis, kedua negara telah melakukan proses sekuritisasi yang dimulai dari proses pembingkaihan, *speech act*, respons kebijakan, sampai pada normalisasi/legitimasi tindakan oleh publik. Jerman dan Inggris juga telah melewati tiga tahapan berdasarkan level spektrum teori sekuritisasi Buzan, yaitu tidak dipolitisasi, dipolitisasi, dan disekuritisasi atau dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan negara. Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa dua negara telah memandang pengungsi sebagai suatu ancaman terhadap identitas, budaya, dan stabilitas keamanan masing-masing negara.

Dampak dari proses sekuritisasi ini membuat standar perlindungan HAM di Jerman menjadi lebih fleksibel demi kepentingan keamanan nasional Jerman. Sekuritisasi pengungsi juga telah menciptakan polarisasi dalam masyarakat Jerman. Di satu sisi penduduk Jerman mendukung pembatasan pengungsi, tetapi di sisi lain mendukung penerimaan pengungsi atas dasar HAM. Sebaliknya, proses sekuritisasi pengungsi di Inggris berdampak pada kebebasan Inggris untuk menciptakan kebijakan pengungsi yang independen.

5.2 Saran

Peneliti mengajukan saran kepada para pengkaji Hubungan Internasional yang memiliki fokus kajian pada *human security*, khususnya pengungsi di Eropa. Saran ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian yang muncul dari penelitian sebelumnya. Adapun saran-saran tersebut diantaranya:

- a. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji alasan Inggris menerima pengungsi Ukraina dan Afghanistan dalam jumlah yang cukup signifikan disamping

kebijakan restriktif dan proses sekuritisasi yang telah berlangsung cukup lama.

- b. Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji perubahan arah kebijakan Jerman terhadap pengungsi akibat proses sekuritisasi yang terjadi.

Dengan demikian, kajian yang lebih mendetail dan spesifik dapat berkontribusi pada kualitas penelitian. Kualitas penelitian yang baik dapat memberikan manfaat praktis dan akademis bagi berbagai pihak, khususnya para akademisi dan praktisi dalam studi keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- ABCNews. (2025). *Thousands of Migrants Attempt Dangerous Crossing to UK in Small Boats*. <https://youtu.be/eXYeDD5dUQQ?si=AcOY4E9AssukcwCn>
- Abdi, M. (2025). *Ein Mangel an Freiheit, ein Mangel an Würde*. Taz.De. <https://taz.de/Tagebuch-von-der-Refugee-Karawane-/!6115911/>
- AIDA. (2018). Country Report : Germany. In *Asylum Information Database*. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2019/04/report-download_aida_de_2018update.pdf
- AlJazeera. (2015). *Merkel Says Refugee Crisis Tests Europe's Core Ideals*. Aljazeera.Com. <https://www.aljazeera.com/news/2015/8/31/merkel-says-refugee-crisis-tests-europes-core-ideals>
- Alkousaa, R. (2025). *Germany's Struggle to House Refugee Fuels Election Debate*. Reuters.Com. <https://www.reuters.com/world/europe/germanys-struggle-house-refugees-fuels-election-debate-2025-02-12/>
- Anckar, C. (2008). On The Applicability of the Most Similar Systems Design and the Most Different Systems Design in Comparative Research. *International Journal of Social Research Methodology*, 11(5), 389–401. <https://doi.org/10.1080/13645570701401552>
- Ataç, E. (2019). *The Populist Radical Right in Germany Ideology & Policies of Alternative für Deutschland (AfD)*. Economic Development Foundation (IKV).
- BBC. (2017). *Germany Hate Crime: Nearly 10 Attacks a Day on Migrants in 2016*.

- Bbc.Com. <https://www.bbc.com/news/world-europe-39096833>
- Beine, M., Docquier, F., & Ozden, C. (2011). Diasporas. *Journal of Development Economics*, 95(1), 30–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.11.004>
- Bhatt, A. (2022). Refugee Crisis : A New Era of Global Conflict. *Education and Society*, 46(4), 53–57. <https://www.researchgate.net/publication/373359595>
- BMI. (2021). *Number of First-Time Asylum Applications Dropped Significantly in 2020*. Federal Ministry of the Interior. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2021/01/asylzahlen-jahr-2020-en.html#:~:text=Additional asylum statistics for 2020,4 of the Asylum Act.>
- Boswell, C. (2016). Migration Report 2015: Central Conclusions. *Federal Office for Migration and Refugees*, 159–189. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511581120.007>
- Braverman, S. (2023). *Home Secretary Statement on The Illegal Immigration Bill*. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/speeches/home-secretary-statement-on-the-illegal-immigration-bill>
- Bundesministerium des Innern. (2019). *Geordnete-Rückkehr-Gesetz tritt heute in Kraft*. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2019/08/geordnete-rueckkehr-gesetz.html>
- Bundesministerium des Innern, für B. und H. (2018). *Masterplan Migration: Maßnahmen zur Ordnung, Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung*. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/masterplan-migration.pdf?__blob=publicationFile&v=7
- Buzan, B., Waeber, O., & Wilde, J. de. (1998). Security: A New Framework for Analysis. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai*

Koran Lampu Hijau (Vol. 16, Issue 2). Lynne Rienner Publishers, Inc.

- Cameron, D. (2015a). *European Council June 2015: David Cameron's Speech*. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/speeches/european-council-june-2015-david-camerons-speech>
- Cameron, D. (2015b). *PM Speech on Immigration*. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-immigration>
- CDU. (2025). *Policy Change for Germany: CDU CSU Election Programme*. <https://www.cdu.de/app/uploads/2025/01/wahlprogramm-cdu-csu-kurzfassung-englisch.pdf>
- Chrisella, S. D. (2022). Komitmen Uni Eropa dalam Pemenuhan Prinsip Non-Refoulement terhadap Negara-Negara Anggota: Studi Kasus Krisis Pengungsi di Yunani Pascakebakaran Kamp Moria. *Belli Ac Pacis*, 7(2), 68. <https://doi.org/10.20961/belli.v7i2.59996>
- Citizen Advice. (2025). *After You Get Refugee Status*. Citizensadvice.Prg.Uk. <https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/asylum-and-refugees/after-you-get-refugee-status/>
- Conesa, E. (2025). *New Year's Eve 2015 in Cologne: The night that traumatized thousands of women and shook Germany*. Le Monde. https://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/12/31/new-year-s-eve-2015-in-cologne-the-night-that-traumatized-thousands-of-women-and-shook-germany_6748974_4.html#
- Cooper, G., & Blumell, L. (2021). Beyond the 'refugee crisis': How the UK News Media Represent Asylum Seekers Across National Boundaries. *International Communication Gazette*, 83(3), 195–216. <https://doi.org/10.1177/1748048520913230>
- Council of Europe. (1950). *European Convention on Human Rights*. 1–34. <https://doi.org/10.1017/S0008197300013908>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edit). SAGE Publications, Inc.
- Dasep, M. (2024). Angela Merkel's Leadership in Germany's Open Door Policy on Handling the Refugee Crisis in Europe. *Journal of Global Strategic Studies*, 04(01). <https://doi.org/10.36859/jgss.v4i1.2135>
- Decarli, J. M. (2022). 2015 Syrian Refugee Responses Based on the Strength of Securitization Discourse. *Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the European Union, 2022*. <https://doi.org/10.5642/urceu.XMDB6145>
- Dehos, F. T. (2017). *The Refugee Wave to Germany and its Impact on Crime* (Issue 737). <https://www.econstor.eu/handle/10419/175407>
- Deutsches Institut für Menschenrechte. (2019). *Vertiefte Diskussion des Geordnete-Rückkehr-Gesetzes erforderlich*. Deutsches Institut Für Menschenrechte. <https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/vertiefte-diskussion-des-geordnete-rueckkehr-gesetzes-erforderlich>
- Di Iasio, V., & Wahba, J. (2024). The Determinants of Refugees' Destinations: Where do refugees locate within the EU? *World Development*, 177(January), 106533. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106533>
- Di Lasio, V., & Wahba, J. (2023). Asylum Seekers in Europe: Where Do People Go and Why? *Economics Observatory*. <https://www.economicsobservatory.com/asylum-seekers-in-europe-where-do-people-go-and-why>
- Diez, T., & Squire, V. (2008). Traditions of Citizenship and the Securitisation of Migration in Germany and Britain. *Citizenship Studies*, 12(6), 565–581. <https://doi.org/10.1080/13621020802450643>
- Dinnen, C. (2015). *PM Likely to Hear His "Swarm" Comment again and again*. Itv.Com.

- Dowling, S. (2019). *Germany Welcomed Refugees. Now it's Reaping the Economic Benefits.* Www.Aljazeera.Com.
<https://www.aljazeera.com/economy/2019/6/20/germany-welcomed-refugees-now-its-reaping-the-economic-benefits>
- Edwards, C. (2025). *Meet the Pink Ladies, a New Face in Britain's anti-immigration Movement.* CNN World. <https://edition.cnn.com/2025/12/12/uk/pink-ladies-britain-anti-immigration-intl>
- EUAA. (2025). *Latest Asylum Trends: January-June 2025.* European Union Agency for Asylum. <https://euaa.europa.eu/latest-asylum-trends-mid-year-review-2025/applications#:~:text=Applications lodged Jan – Jun 2025&text=In the first half of 2025%2C Germany was no longer,seen in the Overview section.>
- Eurogendfor. (2025). *French Gendarmerie Nationale, Member State.* Eurogendfor: European Gendarmerie Force. <https://eurogendfor.org/gendarmerie-nationale-francaise-full-member/>
- European Parliament. (2020). *Dublin Regulation on International Protection Applications* (A. Scherrer (ed.)). European Parliamentary Research Service. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642813/EPRS_STU\(2020\)642813_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642813/EPRS_STU(2020)642813_EN.pdf)
- European Parliament. (2025). *EU-Turkey Statement & Action Plan.* Legislative Train Schedule. <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-turkey-statement-action-plan>
- Eurostat. (2017). *Asylum in the EU Member States.* *Ec.Europa.Eu.* <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1>
- Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V. (2016). *Asylum Package II, What Does it Mean for Refugees and Their Supporters?* https://www.fluechtlingsrat-mv.de/wp-content/uploads/2016/04/Information_Asympaket-2_englisch.pdf

- Fox News. (2017). *Trump, Merkel Defend Responses to Refugee Crisis*. YouTube. <https://doi.org/https://youtu.be/ns4obuhkuLI?si=y76ZtLHsfH0fPAVA>
- FRA. (2016). Monthly Data Collection on the Migration Situation in the EU October 2016 Monthly Report. *European Union Agency for Fundamental Rights, September*, 1–66. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-october-2016-monthly-migration-report_en_0.pdf
- Freedom From Torturer. (2019). *Lessons not Learned: The Failures of Asylum Decision-Making in the UK* (Issue September). https://www.freedomfromtorture.org/sites/default/files/2019-09/FFT_LessonsNotLearned_Report_A4_FINAL_LOWRES_1.pdf
- García, M. M. de. (2021). Bridging the State and Market Logics of Refugee Labour Market Inclusion – A Comparative Study on the Inclusion Activities of German Professional Chambers. *Comparative Migration Studies*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40878-021-00232-6>
- Gerhards, J., Hans, S., & Schupp, J. (2016). German Public Opinion on Admitting Refugees. *The Barometer of Public Opinion on Refugees in Germany*, 833(833), 243–250.
- Gibney, M. J., & Hansen, R. (2003). Deportation and The Liberal State: The Forcible Return of Asylum Seekers and Unlawful Migrants in Canada , Germany and the United Kingdom. *New Issues in Refugee Research*, 77, 1–19. <https://www.unhcr.org>
- Global Compact on Refugees. (n.d.). *The RISE (Refugees Ideas & Solutions for Europe) Network*. Globalcompactrefugees.Org. <https://globalcompactrefugees.org/good-practices/rise-refugees-ideas-solutions-europe-network>
- Global Justice Now. (2018). The Hostile Environment for Immigrants How Theresa May Has Created. *Global Justice Now*. <https://www.globaljustice.org.uk/wp->

content/uploads/2018/03/hostile_environment_briefing_feb_2018_web.pdf

- Gómez, J.-P. C. (2019). *The Securitization of Asylum an Analysis of the Impact of the 2015-2016 Refugee Asylum Policies in Germany*. Global Migration Centre (GMC).
- Goodier, M. (2025). *What Do the Immigration Figures for the UK really Show?* The Guardian. <https://www.theguardian.com/uk-news/2025/sep/14/what-do-the-immigration-figures-for-the-uk-really-show>
- Gov UK. (n.d.). *Claim Asylum in the UK*. Wwww.Gov.Uk. <https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/asylum-and-refugees/after-you-get-refugee-status/>
- Gower, M. (2025). *Unauthorised Migration: Timeline and Overview of UK-France Cooperation*. <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9681/CBP-9681.pdf>
- Griffiths, M., & Yeo, C. (2025). The UK's Hostile Environment: Deputising Immigration Control The UK 's Hostile Environment: Deputising Immigration Control. *University of Brimingham*. <https://doi.org/10.1177/0261018320980653>
- Gurer, C. (2019). Refugee Perspectives on Integration in Germany. *American Journal of Qualitative Research*, 3(2), 52–70. <https://doi.org/10.29333/ajqr/6433>
- Haliza, F. T., & Pujjiono, B. (2019). Kebijakan Open Door Policy Oleh Angela Merkel dalam Kerangka Common European Asylum System (CEAS). *JOM*.
- Hamilton, M. (2016). *Syria Crime Wave Hundreds of Syrians in UK Arrested over String of Offences Including Rape and Child Abuse*. The Sun. <https://www.thesun.co.uk/news/1528756/hundreds-of-syrians-in-uk-arrested-over-string-of-offences-including-rape-and-child-abuse/>
- Hamilton, W. L., Cook, J. T., Thompson, W. W., Buron, L. F., & ... (1997). *Household food security in the United States in 1995: technical report of the food security*

- measurement* *project.* [ageconsearch.umn.edu.
https://ageconsearch.umn.edu/record/344955/](https://ageconsearch.umn.edu/record/344955/)
- Harding, L. (2016). *Pegida Leader Criticised for Linking Munich Terror Plot to Refugee Intake.* *The Guardian.*
<https://www.theguardian.com/world/2016/jan/01/pegida-leader-lutz-bachmann-linking-munich-terror-plot-with-refugee-intake>
- Hatton, T. J. (2004). Seeking Asylum in Europe. *Economic Policy*, 19(38), 5–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2004.00118.x>
- Hentze, T., & Kolev, G. V. (2016). Gesamtwirtschaftliche Effekte der Flüchtlingsmigration in Deutschland. *IW-Trends – Vierteljahresschrift Zur Empirischen Wirtschaftsforschung*, 43(4), 59–76.
<https://econpapers.repec.org/RePEc:zbw:iwktre:157643>
- Hoffmeyer-Zlotnik, P. (2021). *Country Report: Germany.*
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA-DE_2021update.pdf
- Immigration Act 2016 (2016).
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/19/pdfs/ukpga_20160019_en.pdf
- IOM. (2025). Global Overview of Migration. In *International Organization for Migration.* <https://doi.org/10.18356/0389379c-en>
- ITV News. (2015). *PM Blames Calais Crisis on “Swarm” of Migrants.* Itv.Com.
<https://www.itv.com/news/update/2015-07-30/pm-a-swarm-of-migrants-want-to-come-to-britain/>
- Jan, D. (2025). The Spectacular Politics of the United Kingdom’s “Small Boats Crisis.” *International Political Sociology*, 19. <https://doi.org/10.1093/ips/olaf003>
- Joppke, C. (1999). *Immigration and The Nation-State.* Oxford University Press.
- Kalkmann, M. (2015). *Country Report: Germany.* <https://asylumineurope.org/wp->

content/uploads/2015/11/report-download_aida_de_update.iv__0.pdf

Kalkmann, M. (2016). *Country Report: Germany*.

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_de_2016update.pdf

Kalkmann, M. (2017). *Country Report: Germany*. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2018/03/report-download_aida_de_2017update.pdf

Kalkmann, M., & Hesari, D. K. (2019). Country report: Germany. In *Asylum Information Database*. <https://doi.org/10.4337/9781788115926.00022>

Kelsall, H. (2015). *Empathy Legality Politics and Protection: Framing Refugees and Asylum Seekers in the UK*. Press. *Erasmus University Rotterdam*.

Kinkartz, S. (2023). *Germany Struggles to House Refugees*. DW.

<https://www.dw.com/en/germany-struggles-to-house-refugees/a-66332089>

Kirk-wade, E., & Barton, C. (2025). Asylum Statistics. *The House of Commons Library*, 35(149), 148–148. <https://doi.org/10.1192/bjp.35.149.148>

Kok, T. H. (2021). Migration Attitudes in Germany and the UK in Times of Change: A Quantitative Study Comparing Attitudes toward Migration in 2002 and 2016 [University of Gothenburg]. In *Department of Political Science Centre for European Studies (CES)*. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/68221/gupea_2077_68221_1.pdf?sequence=1

Kushner, J. (2017). *Dresden's Welcome Cafes for Refugees*. [Www.Aljazeera.Com](http://www.aljazeera.com).

<https://www.aljazeera.com/features/2017/7/27/dresdens-welcome-cafes-for-refugees>

Lindvall, A. (2016). Have Refugees Become A Security Problem? A comparative Study of securitization in the United Kingdom and Germany. *University of Gotenburgh*, 41.

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/42428/1/gupea_2077_42428_1.pdf

- Liu, Y., & Yin, S. (2021). The Adjustment, Consequences and Challenges of German Refugee Policy. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 571*(Isemss), 891–896.
- Lutfie, R. Z., Opranata, W., Riyadinta, N., & Alunaza, H. (2024). Dampak Open Door Policy pada Stabilitas Ekonomi dan Politik Jerman serta Hubungan dengan Uni Eropa. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 1–13.
- Mahendra, F. A., Wismaningsih, & Suherman, A. M. (2025). British Government Policy in Managing Refugee Problems After the British Exit in 2020: A Review from International Law. *Jurnal Hukum in Concreto*, 4(1), 75–86.
- McCharty, S. E. T. (2025). *Asylum Seeker Decision-Making in Journeys to United Kingdoms* (2022). [Www.Gov.Uk. https://www.gov.uk/government/publications/asylum-seeker-decision-making-in-journeys-to-the-united-kingdom-2022/asylum-seeker-decision-making-in-journeys-to-the-united-kingdom-2022](https://www.gov.uk/government/publications/asylum-seeker-decision-making-in-journeys-to-the-united-kingdom-2022/asylum-seeker-decision-making-in-journeys-to-the-united-kingdom-2022)
- MEMO. (2015). *EU-Turkey Joint Action Plan*. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/memo_15_5860/MEMO_15_5860_EN.pdf
- Merkel, A. (2015). *Sommer-Pressekonferenz der Kanzlerin zu aktuellen Themen (Teil 1)* am 31.08.2015. Phoenix. <https://www.youtube.com/watch?v=TQgaXHMMkwM>
- Middleton, D. (2005). Why Asylum Seekers Seek Refuge in Particular Destination Countries: An Exploration of Key Determinants. *Global Migration Perspectives*, 34.
- Migration Watch UK. (2024). *Is Immigration a Threat to UK Security?* [Migrationwatchuk.Org. https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/520/is-immigration-a-threat-to-uk-security](https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/520/is-immigration-a-threat-to-uk-security)

- Miles B., M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. In *SAGE Publications, Inc* (Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Mouzourakis, M., Pollet, K., & Ott, J.-D. (2019). The Anker Centres: Implications for Asylum Procedures, Reception and Return. *European Council on Refugee and Exiles Asylum Information Database*. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2020/11/anker_centres_report.pdf
- Munshi, K. (2020). Social Networks and Migration. *Annual Review of Economics*, *12*, 503–524. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-082019-031419>
- Mustaq, S., Hamid, D., & Shaikh, A. (2021). Securitisation of the Refugee Issue in Germany: The Far Right Challenge to Government Policies. *Malaysian Journal of International Relations*, *9*, 1–21. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/mjir/article/view/25375/14081>
- NATO. (n.d.). *French Gendarmerie*. NATO Stability Policing. Retrieved November 15, 1 B.C.E., from <https://www.nspcoe.org/about-us/sponsoring-nations/french-republic/french-gendarmerie/>
- Niu, Z., Song, W., Lu, Y., & Bao, X. (2023). Merkel Government 's Refugee Policy: Under Bounded Rationality. *Social Sciences*, *12*(187), 2–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/socsci12030187>
- Nurtyandini, R. T., & Santoso, M. P. T. (2022). The Impact Of The Brexit Referendum On European Union Immigrant Policy In The UK. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, *2*, 44–48. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/lino/article/view/1459/786>
- Oltmer, J. (2016). Germany and Global Refugees: A History of the Present. *CESifo DICE Report*, *14*(4), 26–31. <https://www.ifo.de/DocDL/dice-report-2016-4-oltmer-december.pdf>
- Otukoya, T. A. (2024). The Securitization Theory. *International Journal of Science*

- and Research Archive*, 11(01), 1747–1755. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3322-1.ch001>
- Oxford Economics. (2018). *The Fiscal Impact of Immigration on The UK: A Report for the Migration Advisory Committee*. June.
- Özoguz. (2015). *Deutscher Bundestag: Mediathek - Özoguz, Aydan, Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration*. Deutscher Bundestag. <https://doi.org/http://dbtg.tv/fvid/5890688>
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the Quality and Credibility of Qualitative Analysis. *Health Services Research*, 34(5 Pt 2), 1189–1208. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10591279><http://www.pubmedcentral.nih.gov>
- Perez, C. S. (2023). The Securitization of Asylum: A Review of UK Asylum Laws Post-Brexit. *International Journal of Refugee Law*, 35(3), 304–321. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eead030>
- phoenix. (2015). *G7-Dialogforum: Rede von Angela Merkel zur Flüchtlingskatastrophe am 20.04.2015*. YouTube. <https://doi.org/https://youtu.be/nkxZnOeRtWw?si=5xv706Mbx9iEYh2p>
- Pierce, P., Adil, H., Kwok, T., Cooke, C., Bazinet, D., Roll, K., & Hillman, S. L. (2025). Effects of UK Hostile Environment Policies on Maternity Care for Refugees, Asylum Seekers, and Undocumented Migrants in Camden: Examining the Experiences of Healthcare Professionals and Community Organisations. *Journal of Migration and Health*, 11(March 2024), 100291. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2024.100291>
- Prihatini, G. A. (2023). *Implementasi Open Door Policy di Jerman Tahun 2015-2019*.
- PRO ASYL. (n.d.). *Standing up for Refugee Protection*. Proasyl.De. Retrieved February 4, 2026, from <https://www.proasyl.de/en/standing-up-for-refugee-protection/>

- PRO ASYL. (2019). *Das »Geordnete-Rückkehr-Gesetz« ignoriert rechtsstaatliche Grundsätze.* PRO ASYL. <https://www.proasyl.de/news/das-geordnete-rueckkehr-gesetz-ignoriert-rechtsstaatliche-grundsaeetze/>
- Putra, I. D. G. P. P., Susanti, S., & Dewi, P. R. K. (2016). Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa di Inggris. *Penelitian*, 1–12.
- Radu, A. G. (2018). 2018 British Media Representations of Refugees: The case of The Guardian. *Jonkoping University*.
- Refugee Council. (2022). *A British National Refugee Policy. October.*
- Richards, L., Raino, M. F., & Blinder, S. (2025). UK Public Opinion toward Immigration: Overall Attitudes and Level of Concern. *Centre on Migration, Policy & Society (COMPAS)*, 1–16. <http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/>
- Riemer, L., Rau, L., & Schalast, R. (2024). *Country Report: Germany.* https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2025/06/AIDA-DE_2024-Update.pdf
- Rowsome, A. (2018). *From Periods to Pregnancy- The Sexual Health Crisis for Calais Refugee.* The Guardian. <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/feb/26/periods-to-pregnancy-sexual-health-crisis-calais-refugees-volunteers-gynaecology-without-borders>
- Sahin-Mencutek, Z., Barthoma, S., Gökalp-Aras, N. E., & Triandafyllidou, A. (2022). A Crisis Mode in Migration Governance: Comparative and Analytical Insights. *Comparative Migration Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40878-022-00284-2>
- Saran, A., Manager, E. P., & Trust, B. C. (2009). Public Attitudes on Immigration: The United Kingdom in an International Context About the Transatlantic Council on Migration. *Migration Policy Institute*.
- Schikora, F. (2019). Initial Placement Restrictions: Opportunity or Challenge for

- Refugee Integration? *Research Report*, 17(2016), 41–44.
- Setiabudi, C. S. (2021). Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic Di Eropa. *Wanua : Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*, 6(1), 81. <http://www.tandfonline.com>
- Shah, M. M. S. (2024). *Understanding Barry Buzan's Securitization Theory*. February. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18293.55526>
- Siddiqui, R. H. (2024). A Comparative Analysis of Immigration Laws: Case Studies of the Canada, Germany, the United States of America (USA) and the United Kingdom (UK). *International Journal of Law Analytics*, 2(2), 115–132. <https://doi.org/10.59890/ijla.v2i2.1743>
- SPIEGEL. (2014). *Anti-Muslim Movement Rattles Germany*. [Www.Spiegel.De](http://www.Spiegel.De). <https://www.spiegel.de/international/germany/anti-muslim-pegida-movement-rattles-germany-a-1009245.html>
- Steffy. (2023). *Implementasi Kebijakan Angela Merkel terhadap Gelombang Pengungsi Timur Tengah*. 14(1), 32–46.
- Stewart, H., & Mason, R. (2016). *Nigel Farage's anti-Migrant Poster Reported to Police*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/16/nigel-farage-defends-ukip-breaking-point-poster-queue-of-migrants>
- Stiller, M., & Hoffmeyer-Zlotnik, P. (2022). *Country Report : Germany*. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2023/04/AIDA-DE_2022update.pdf
- Strickland, P. (2016). *The Rise of Germany's anti-Refugee Right*. Aljazeera.Com. <https://www.aljazeera.com/features/2016/4/7/the-rise-of-germanys-anti-refugee-right>
- Terre des Hommes. (2024). *Stories Shape Societies* (Www.emilysadler.com (ed.)).

PositiveComms.co.uk. <https://terredeshommes.org/wp-content/uploads/2024/10/TDH-hope-based-comms-guidelines-8-web.pdf>

The Federal Government. (2015). *Statement by Federal Chancellor Angela Merkel to the European Parliament*. Bundesregierung. www.bundesregierung.de

Trines, S. (2019). *The State of Refugee Integration in Germany in 2019*. World Education News + Review. <https://wenr.wes.org/2019/08/the-state-of-refugee-integration-in-germany-in-2019>

UK Parliament. (n.d.). *MPs to Question Border Security Commander on Tackling Small Boat Crossings*. Committes Parliament UK2025. Retrieved November 15, 2025, from <https://committees.parliament.uk/committee/83/home-affairs-committee/news/209585/mps-to-question-border-security-commander-on-tackling-small-boat-crossings/>

UNHCR/IOM. (2015). *A Million Refugees and Migrants Flee to Europe in 2015*. Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/news/news-releases/million-refugees-and-migrants-flee-europe-2015>

UNHCR. (n.d.). Addressing Refugee Security. *The State of the World's Refugees*. <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/4444afc80.pdf>

UNHCR. (1951). Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees. *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*. <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-02/1951-refugee-convention-1967-protocol.pdf>

UNHCR. (2008). *The Dublin Regulation for Determining the Member State Responsible for Examining an Asylum Application Lodged in One*. <https://www.unhcr.org/media/dublin-regulation>

UNHCR. (2025). *Refugee*. Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/refugees>

- Uranga, A. (2021). Securitizing Immigrants: Applying Securitization Theory in German Politics. *Pathways*, 1(3), 1–14.
- Venkataramakrishnan, S. (2025). “Total remigration”: Anti-Migrant Narratives Targeting the UK. Institute for Strategic Dialogue. <https://www.isdglobal.org/digital-dispatch/total-remigration-anti-migrant-narratives-targeting-the-uk/>
- Virdee, S., & Mcgeever, B. (2018). Racism, Crisis, Brexit. *Ethnic and Racial Studies*, 9870(10). <https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1361544>
- Warmbein, A., Beiersmann, C., Eulgem, A., Demir, J., & Neuhan, F. (2023). Challenges in Health Care Services for Refugees in Cologne, Germany: A Providers’ Perspective using a Mixed-Methods Approach. *Journal of Migration and Health*, 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jmh.2023.100158>
- Weis, P. (1999). The Refugee Convention, 1951. *Verfassung in Recht Und Übersee*, 32(3), 397–398. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1999-3-397>
- Yaseen, M., Ghayoor, S., Hassan, M. S., Jabeen, F., & Shakir, M. ul H. (2025). The Political Dynamics of Refugee Migration in Europe: Analyzing the Impact of Nationalism, EU Solidarity, and the Dublin Regulation Post-2015 Migrant Crisis. *The Critical Review of Social Sciences Studies*, 3(1), 486–510. <https://doi.org/10.59075/ma4tcx41>
- Yeni, M. F. (2019). Motivasi Jerman dalam Menerima Pengungsi Asal Suriah Pada Tahun 2015. *Frequency of International Relations*, 1(1), 158–201.
- Yurisman, H. (2024). *Perubahan Kebijakan Imigrasi Open Door menjadi Kebijakan Point Based System Inggris di Tahun 2016-2023*.
- Zolberg, A. R. (1999). The Politics of Immigration Policy: An Externalist Perspective. *Sage Social Science Collections*, 42, 1276–1279. <https://doi.org/10.1177/00027649921955056>

Zusammenfassung. (2021). *Länderbericht : Deutschland 2021.*

<https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA->

DE_2021update_summary.pdf